

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO LAMPUNG**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam**



Oleh:

ARINDA FIRDIANTI
NPM: 1886031033

**PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mempunyai masalah dalam dunia pendidikan, dimana hingga saat ini ketertinggalan mutu pendidikan masih kita rasakan. Mutu pendidikan yang buruk dapat menjadi penghalang tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan, keahlian dan integritas guna meningkatkan pembangunan bangsa diberbagai bidang. Setiap lulusan dari suatu perguruan tinggi masih dianggap sebagai kaum cendekia yang serba bisa dan memiliki potensi akademik serta menjadi tempat bertanya dan berdiskusi. Hal ini menunjukkan perguruan tinggi harus dapat memastikan para alumni mempunyai kompetensi dalam spesifikasi program studi yang telah ditetapkan, serta menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan visi misi perguruan tinggi serta perkembangan Ilmu Pengetahuan teknologi (IPTEK) dan kebutuhan masyarakat. Mutu akademik yang bersifat dinamis senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan realita sosial budaya yang senantiasa berkembang.¹

Fenomena yang berkembang dimasyarakat di era 4.0 mengalami banyak perkembangan, masyarakat mulai kritis dan sangat mempertimbangkan kelayakan perguruan tinggi yang menjadi tempat acuan belajar. Animo yang berkembang di

¹ Erwin Dwi Edi Wibowo, "Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9 (2013), h. 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

masyarakat saat ini dalam menentukan pilihan perguruan tinggi yang akan diambil diantaranya dengan melihat visi misi perguruan tinggi, hal ini berkaitan erat dengan karakter yang akan dimiliki mahasiswa/ lulusan. Selain itu masyarakat juga akan melihat tingkat akreditasi perguruan tinggi, dimana sistem penjaminan mutu internal suatu perguruan tinggi tentu sangat berpengaruh dan berperan penting dalam mendapatkan pencapaian peringkat akreditasi. Calon mahasiswa baru juga melihat kualitas pelayanan dan berbagai fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi dalam menentukan keputusannya untuk studi lanjut. Jarak dan letak yang strategis serta besaran biaya yang harus dikeluarkan merupakan faktor penentu dalam menentukan tempat kuliah, dan masih banyak faktor yang lain. Namun demikian hal yang paling penting adalah dengan memandang fungsi dan manfaat kedepan yang berkelanjutan, dimana perguruan tinggi memiliki tanggungjawab dalam menyediakan mutu yang berkualitas baik dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) maupun IMTAQ (Iman dan Taqwa). Sistem penjaminan mutu *internal* menjadi sangat penting, karena dengan adanya mutu *internal* yang berkualitas secara otomatis akreditasi perguruan tinggi tersebut tentu akan mendapatkan nilai optimal serta diakui sebagai lembaga pendidikan yang memiliki daya saing.

Pemerintah memegang kendali sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebelum tahun 1998, hal ini terlihat dari ketetapan kurikulum nasional, model statuta, keberadaan ujian negara, dan masih banyak lainnya yang ditetapkan pemerintah yang wajib dilaksanakan dan diterapkan oleh perguruan tinggi. Gerakan reformasi 1998 telah membawa angin segar, peran pemerintah dideregulasi pada hampir semua sektor termasuk pendidikan tinggi yang

dikembalikan pada fungsi dan keutamaannya, dengan demikian pendidikan tinggi telah memiliki kebebasan dalam otonomi keilmuan, kebebasan akademik serta memiliki otonomi perguruan tinggi untuk mengatur rumahtangganya.

Pendidikan tinggi mempunyai hak otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, sebagaimana telah dikokohkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sebagaimana pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.² Pasal tersebut menjelaskan bahwa otonomi perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang dapat mengelola sendiri lembaganya secara mandiri. Sejak tahun 2003 legalisasi ijazah PTS (Perguruan Tinggi Swasta), model statuta, kurikulum nasional atau kurikulum inti, sebagai bentuk kendali mutu yang dilakukan pemerintah dihapus secara bertahap. Penghapusan tersebut menyebabkan perguruan tinggi diharuskan dapat menetapkan, mengimplementasikan, mengevaluasi, mengendalikan serta dapat meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi secara otonom/ mandiri sehingga visi yang dicita-citakan dapat tercapai dengan optimal.

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan dan perubahan peradaban dunia. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik dibutuhkan adanya inovasi pendidikan serta peningkatan kualitas dan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat³, sehingga pendidikan harus terus

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 20, "Tentang Sistem Pendidikan Nasional", (2003).

³ Christian M Stracke, "Quality Frameworks and Learning Design for Open Education Introduction: The Need to Change Learning and Education", *International Review of Research in*

diberikan sesuai dengan zaman dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, di samping itu juga harus ditunjang dengan pendidikan karakter yang tidak dapat dilepaskan dari peran penting pendidikan agama dalam segala lini kehidupan. Pendidikan Agama Islam memiliki misi yang diemban yaitu mendidik manusia agar menjadi orang yang beriman dan bertaqwa, sehingga muaranya adalah terciptanya situasi dan kondisi tatanan masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan di alam semesta yang *rahmatan lil alamin*.⁴ Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) telah mengimplementasikan kurikulum yang mencakup semua aspek baik IPTEK maupun IMTAQ sebagai bekal lulusan dalam mengemban amanah menjadi *khalifah* untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya.

Seseorang, kelompok maupun komunitas memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam diri untuk dapat melakukan suatu perubahan, pengembangan juga peningkatan. Kekuatan tersebut adalah semangat untuk berkorban dan berjuang agar lebih baik dalam mencapai tujuan. Terdapat sebagian orang yang berpandangan bahwasannya seseorang atau kelompok mau bergerak apabila ada yang diperoleh, bisa berupa uang, jabatan, harta benda atau jenis lain yang bersifat materi. Hal tersebut tidaklah salah, akan tetapi ada kekuatan yang jauh lebih besar yang dapat mengalahkan argumen di atas yaitu adanya jiwa perjuangan dan pengorbanan atas panggilan keyakinan agama.

Open and Distributed Learning, Vol. 20 No. 2 (2019), tersedia pada www.scholar.google.com (2019). Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

⁴ Syaiful Anwar, "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 (2016), hal. 162,.

Pemberian jaminan mutu oleh lembaga pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, dimana lembaga harus memberikan kepastian pendidikan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep mutu kini menjadi syarat mutlak dalam persaingan di era masyarakat global, jika sebelumnya kualitas suatu produk hanya menjadi target di dalam dunia bisnis dan industri yang diukur melalui kepuasan konsumen/ pengguna, akan tetapi saat ini dalam menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pasar kerja, dunia pendidikan juga menerapkan hal yang sama. Pendidikan merupakan aset berharga yang tak ternilai, sehingga sudah seyogyanya pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan mulai dari perencanaan, proses hingga evaluasi. Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk mengembangkan potensi diri menjadi pribadi yang berkompeten, unggul dan berkualitas sehingga menjadikan manusia yang bermutu baik dihadapan manusia maupun Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al-Mujadallah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bandung: PT. Sygma Axamedia Arkanleema(sygma publishing), 2009), h.543

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bisa diperoleh setiap manusia dan dijamin oleh negara. Mutu pendidikan harus terukur dan terjamin tidak hanya diakui oleh lembaga itu sendiri (*internal*) akan tetapi oleh luar lembaga yang faham akan kebermaknaan mutu pendidikan (*eksternal*). Adanya pengelompokan/ peringkat juga diperlukan dalam hal ini guna menanamkan budaya mutu dan memunculkan persaingan yang sehat antar lembaga pendidikan serta mempermudah dalam melakukan pembinaan, perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan lembaga yang masih kurang. Lembaga pendidikan yang sudah baik didorong untuk terus berkembang sehingga dapat terus melampaui standar yang sudah ditetapkan. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses dalam suatu siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan (pemenuhan), pengendalian dan pengembangan yang dilaksanakan dengan konsisten secara terus menerus berkelanjutan, sehingga baik stake holder internal maupun eksternal suatu instansi perguruan tinggi memperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi bersangkutan.⁶

Pada kenyataannya kualitas mutu pendidikan belum begitu nampak menggembirakan, hal ini terlihat dari masih cukup banyak sarjana yang bekerja tidak sesuai keahliannya bahkan belum terserap sebagai tenaga kerja (pengangguran). Di era globalisasi 4.0 ini masyarakat mengharapkan adanya kepastian lembaga pendidikan sehingga lulusan yang dihasilkan mampu bersaing dengan bangsa lain. Perguruan tinggi Islam diharapkan dapat membina dan

⁶ Ahmad. S & Udik.B.W, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada", *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (April 2016), h. 18.

melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan islami sehingga alumni yang dihasilkan bermutu dengan memiliki *skill*, wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang tidak hanya menguasai keilmuan yang diajarkan dosen, akan tetapi alumni juga dapat mengaplikasikan dan mengembangkan keilmuan yang dilandasi dengan keimanan, *akhlakul karimah* serta sesuai dengan aturan agama maupun pemerintah.

Pentingnya peningkatan mutu juga ditekankan di dalam Islam sehingga menjadi konsep utama dalam penentuan kualitas diri manusia. Islam menghendaki umatnya untuk bisa mandiri sehingga bisa saling mengokohkan dan membesarkan satu sama lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِخْرَصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ

فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, Ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.⁷

⁷ Hadist Shahih diriwayatkan oleh Muslim (no. 2664), “Ahmad (II/366, 370); Ibnu Majah (no. 79, 4168); an-Nasa-i dalam Amalul Yaum wal Lailah (no. 626, 627); at-Thahawi dalam Syarh Musykilil Aatsar (no. 259, 260, 262); Ibnu Abi Ashim dalam Kitab as-Sunnah (no. 356)”.

Hadist di atas menerangkan bahwa dalam konsep pendidikan Islam kualitas mutu diri manusia menjadi prioritas penting, sehingga sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dalam membentuk generasi Islam yang bermutu tinggi yang dapat saling menguatkan satu sama lain. Islam mengajarkan agar umat manusia mempersiapkan dan melakukan proses yang terbaik sehingga dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. Ayat di atas juga mengajarkan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah SWT serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan semakin baik.

Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu disekitar manusia yang sedang mengalami proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi dan menentukan proses pendidikan yang dialami oleh manusia dimana konsekuensinya dapat dilihat dari hasil proses tersebut.⁸ Kota Metro merupakan salah satu kota yang terletak di propinsi Lampung dengan luas 68,74 km^2 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 170.852 jiwa.⁹

Lembaga pendidikan sudah seharusnya merevitalisasi peran lembaga pendidikan agar berperan secara maksimal untuk menghasilkan sumberdaya manusia islami yang bermutu dalam mewujudkan *academic excellence for education, for industrial relevance, for contribution for new knowledge and for*

⁸ Umi Hijriyah, dkk “*Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Tipe Kepribadian Terhadap Konflik Sosial Kelompok Antar Agama (Studi Survey Pada Lingkungan Pendidikan Di Tingkat Menengah Atas Kabupaten Lamsel)*”, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013). h.18

⁹ Badan Pusat Statistik, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2019”, 2019, tersedia pada https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1872/api_pub/WVRITTcySIZDa3IUcFp6czNwbHI4QT09/da_03/1 (2019).

empowerment.¹⁰ Perguruan tinggi harus memberikan penjaminan mutu *internal* agar kegiatan berjalan dengan baik secara berkesinambungan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik dalam rangka meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Pendidikan tinggi dapat menetapkan suatu model implentasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang paling cocok dengan kekhasan yang dimiliki diantaranya cita-cita pendiri, jenis, bentuk dan program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya yang dimiliki. Namun demikian Direktorat Penjamin Mutu memberikan standar minimal SPMI yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagaimana tertera dalam UU Dikti (Undang-undang Pendidikan Tinggi). Setelah SPMI dirasa cukup baik maka pihak lembaga Pendidikan Tinggi membuat permohonan kepada LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) atau BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) untuk melakukan penilaian kelayakan program studi dan perguruan tinggi melalui akreditasi. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh LAM atau BAN-PT tidak akan memiliki nilai lebih dari sekedar secarik kertas yang menerangkan status akreditasi, manakala suatu perguruan tinggi hanya bekerja secara maksimal saat menjelang akreditasi baik tingkat jurusan/ program studi maupun perguruan tinggi, oleh sebab itu sistem penjaminan mutu internal ini menjadi sangat penting karena kualitas yang di harapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang adalah perguruan tinggi yang benar-benar bermutu dalam regulasinya.

¹⁰ M. Ihsan Dacholfany, “, Inisiasi strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi”, *Jurnal At-Tajdid*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2017), h. 2.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 51 UU Dikti, menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu apabila dapat menghasilkan lulusan yang secara aktif mampu mengembangkan potensinya dan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa juga negara.¹¹ Ukuran keunggulan perguruan tinggi kini tidak hanya dilihat dari aspek fasilitas yang bersifat fisik saja, seperti kehebatan tampilan gedung, laboratorium, perpustakaan, keindahan taman, perkantoran dan lain sebagainya. Semua hal tersebut penting, namun keunggulan perguruan tinggi bersifat non fisik yang diakui oleh kalangan ilmuwan yang luas karena perguruan tinggi mampu melahirkan karya-karya akademik yang bermutu jauh lebih berarti dan bermakna. Lulusan perguruan tinggi yang telah diwisuda akan dipertanyakan oleh masyarakat tentang kemampuannya, yaitu bisa melakukan apa, mampu menciptakan apa, akan bekerja dimana dan seterusnya. Perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro juga berusaha untuk bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar sehingga lulusan dari perguruan tingginya dapat diserap di dunia kerja bahkan mampu berdiri sendiri. Adapun data yang didapat oleh penulis dari hasil *prasurvey* selama sepuluh hari (11 – 20 November 2019) di perguruan tinggi IAIN Metro Lampung, yang akan dijadikan tempat penelitian adalah sebagai berikut:

1. IAIN Metro merupakan satu-satunya PTKIN di Kota Metro Lampung.
2. IAIN Metro memiliki letak strategis yang mudah dijangkau.

¹¹ Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), h. 12-13

3. IAIN Metro berhasil menjadi PTKI pertama di Indonesia yang menerima International Organization for Standardization (ISO) 21001:2018 EOMS (Educational Organizations Management System), yang merupakan standar internasional bidang sistem manajemen organisasi pendidikan dari PT Decra Group Indonesia. Sertifikat ini merupakan pengakuan spesifikasi terhadap sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di IAIN Metro.
4. Data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa mahasiswa IAIN Metro yang putus uang kuliah tunggal (UKT) berjumlah 1.159 orang.
5. Akreditasi Perguruan Tinggi IAIN Metro Lampung dari 23 prodi yang ada di IAIN Metro Lampung ada 3 prodi yang terakreditasi A (D-III Perbankan Syari'ah, Ekonomi Syari'ah dan Pendidikan Agama Islam), 19 Prodi terakreditasi B/ Baik, dan ada 1 Prodi terakreditasi C (PIAUD). Adapun data akreditasi IAIN Metro Lampung dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 1. Akreditasi Program Studi Perguruan IAIN Metro

No	Program Studi	AKREDITASI
1	Ekonomi Syariah	A
2	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	B
3	Perbankan Syariah (D-III)	A
4	Perbankan Syariah	B
5	Akuntansi Syariah	Baik
6	Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhshiyah)	B
7	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	Baik
8	Bimbingan Penyuluh Islam	Baik
9	Manajemen Haji dan Umroh	Baik
10	Komunikasi dan Penyiaran Islam	B
11	Bahasa dan sastra Arab	B
12	Pendidikan Guru madrasah Ibtidaiyah	B
13	Pendidikan Bahasa Arab	B
14	Tadris Bahasa Inggris	B
15	Tadris IPS	Baik
16	Tadris Matematika	Baik

17	Tadris Biologi	Baik
18	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	C
19	Pendidikan Agama Islam	A
20	Pendidikan Agama islam (S2)	B
21	Ekonomi Syari'ah (S2)	Baik
22	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	B
23	Hukum Keluarga (S2)	B

Sumber: www.banpt.or.id

Data yang didapat dari BAN-PT terlihat bahwa perguruan tinggi IAIN Metro memiliki 23 program studi. Satu program studi diantaranya mendapatkan akreditasi C (prodi S1 PIAUD), tiga prodi terakreditasi A (D-III Perbankan Syari'ah, Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam), sedangkan 19 program studi lainnya mendapatkan akreditasi B/ Baik. IAIN Metro memiliki keunikan yaitu menjadi PTKI yang pertama dapat meraih sertifikat ISO:21001 se-Indonesia, namun demikian di IAIN Metro masih ditemukan adanya prodi yang terakreditasi C dan tidak sedikit mahasiswa yang putus UKT. Perguruan tinggi IAIN Metro masih perlu melakukan pengembangan-pengembangan guna menjamin mutu lulusan, sehingga dukungan terhadap visi Kota Metro sebagai kota pendidikan dapat terwujud secara optimal dengan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang berjiwa ke-Indonesiaan.

Keunggulan manusia dihasilkan melalui proses pendidikan yang bermutu atau memiliki keunggulan. Pendidikan adalah determinan keunggulan kompetitif sebagai penentu arah keberhasilan. Pemerintah melalui berbagai kajian dan kebijakan telah melakukan banyak upaya dalam rangka menciptakan pendidikan bermutu bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam amanat pembukaan UUD (Undang-undang Dasar) 1945 bahwa salah satu tugas negara

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya amanat UUD 1945 pasal 31 juga menyebutkan tentang hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan serta kewajiban pemerintah membiayai dan menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan lain tentang pendidikan diantaranya UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 53 ayat 3 UU Dikti tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Secara formal kultivasi bidang penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia dimulai pada tahun 2003, tepatnya yaitu saat diterbitkannya pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi oleh Dikti Depdiknas (pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional), namun demikian pergerakan penjaminan mutu sebenarnya sudah ada jauh sebelum itu hanya saja belum terdokumentasikan dengan baik. Faktor pendorong pergerakan penjaminan mutu perguruan tinggi salah satunya adalah dengan ditetapkannya HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) pada tahun 2003-2010 dengan harapan pendidikan tinggi nasional bisa memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kemampuan kompetensi bangsa sekaligus organisasi perguruan tinggi yang sehat dan berkualitas dapat terwujud (Dirjen Dikti, 2003). Perkembangan selanjutnya ketika pemberian *blockgrant* mempersyaratkan penyertaan adanya kesediaan perguruan tinggi nasional menyelenggarakan sistem penjaminan mutu, maka gerakan penjaminan mutu di setiap perguruan tinggi menjadi semakin cepat pertumbuhannya. Faktor tersebut adalah pemicu utama munculnya lembaga khusus sebagai wadah penjaminan mutu pada setiap perguruan tinggi di Indonesia, meskipun pada akhirnya tidak sedikit pelaksanaan penjaminan mutu terlahir bukan diprakarsai oleh dorongan

internal budaya mutu, akan tetapi hanya semata-mata kepentingan pemenuhan administratif persyaratan mendapatkan *blockgrand*. Seiring berjalannya waktu tentu diharapkan perguruan tinggi dapat menginternalisasikan budaya mutu dalam setiap aktivitas civitas akademika.

Tantangan munculnya sistem penjaminan mutu perguruan tinggi paling tidak diidentifikasi berdasarkan tiga faktor, diantaranya perubahan tuntutan pada perguruan tinggi dikarenakan semakin langkanya sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, keharusan adanya akuntabilitas publik dan adanya persyaratan kualifikasi lulusan oleh pasar kerja.¹² Pemaparan latar belakang di atas menjadikan peneliti tertarik mengambil dan melakukan penelitian tentang “Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung”.

B. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian di atas, maka fokus yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sistem penjaminan mutu internal di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

2. Sub Fokus

Adapun sub fokus di dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Penetapan standar pendidikan tinggi bidang akademik;
- b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik;
- c. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik;
- d. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik;

¹² Mark Olssen, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*, (London: Sage Publications, 2004), h. 194

- e. Peningkatan standar pendidikan tinggi bidang akademik.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penetapan standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung?
3. Bagaimana evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung?
4. Bagaimana pengendalian (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung?
5. Bagaimana peningkatan standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan sistem penjaminan mutu internal bidang akademik di IAIN Metro Lampung, secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penetapan standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung.
3. Untuk menganalisis evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung.

4. Untuk menganalisis pengendalian (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung.
5. Untuk menganalisis peningkatan standar pendidikan tinggi bidang akademik di IAIN Metro Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian sistem penjaminan mutu internal di IAIN Metro Lampung antara lain:

1. Manfaat Teoritis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan temuan baru yang substantif maupun formal, sehingga memperkaya teori keilmuan manajemen pendidikan khususnya dapat menambah wacana baru keilmuan manajemen pendidikan Islam. Penelitian ini dapat menghasilkan konsep tentang sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi keagamaan Islam bidang akademik, sehingga penelitian ini diharapkan bias meningkatkan mutu perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi sebagai salah satu sumber informasi sekaligus koreksi untuk meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang ideal dan berkualitas.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Mutu berkaitan erat dengan penilaian barang atau jasa. Mutu bersifat abstrak sehingga memiliki makna yang beragam bergantung pada perspektif individu terhadap mutu. Peningkatan mutu pendidikan adalah hal paling penting yang harus dilakukan lembaga, akan tetapi karena sifatnya yang abstrak membuat mutu sulit diukur sehingga tidak ada ketetapan yang pasti apa yang membuat lembaga pendidikan bermutu tinggi.¹ Hal tersebut menyebabkan perbedaan kriteria penilaian terhadap mutu suatu lembaga pendidikan memiliki makna yang berlainan tergantung pada konteks yang ada.

Mutu merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan baik yang diharapkan atau yang tersirat.² Mutu dalam pengertian memenuhi spesifikasi kepuasan tersebut sering disebut sebagai kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan atau disebut pula definisi kualitas menurut produsen. Kualitas menurut produsen ini dicapai bilamana produk atau jasa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu produser secara konsisten. Kualitas didemonstrasikan oleh produsen dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan mutu yang memungkinkan produksi yang konsisten dari produk dan jasa untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Bilamana produk atau

¹ Edward Sallis, *Total quality management in education: Third edition, Total Quality Management in Education: Third Edition*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9780203417010>. h.1

² Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT Refika Adikarya, 2010).h.52

jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar/kriteria yang telah ditetapkan tadi maka produk atau jasa itu dianggap bermutu.

Mutu produk pendidikan dipengaruhi oleh sejauhmana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran sarana prasarana, tenaga pendidik, keuangan dan termasuk hubungan dengan masyarakat.³ Dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan stakeholder dan lembaga dapat berperan secara dinamis dalam persaingan global, maka perlu membuat formulasi strategi peningkatan mutu lembaga dengan baik. Formulasi strategi ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk membuat perencanaan strategis yang dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses peningkatan mutu era global yang terjadi saat ini.⁴

Standar mutu dalam dunia pendidikan dirumuskan baik melalui pengukuran kuantitatif khususnya bidang skolastik, dan pengukuran kualitatif khususnya bidang pendidikan agama, moral dan budi pekerti.⁵ Rumusan mutu pendidikan mengacu pada proses belajar mengajar, tenaga pendidikan, kurikulum, kebijakan dan sarana prasarana. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tetapi harus disesuaikan dengan pandangan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang cenderung berkembang mengikuti perubahan zaman.

³ Faisal Mubarak, "Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam", *Jurnal Management of Education*, Vol. 1 No. 1 (n.d.), <https://doi.org/ISSN 977-24442404>.

⁴ Prim Masrokan Mutohar, "Formulasi Strategi Peningkatan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Timur", *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019), h. 14.

⁵ Deni Koswara dan Nani Hartini, *Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfa Beta, 2018).h.395

Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: 1) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan *educational production function* atau *input-input* analisis yang tidak konsisten; 2) Penyelenggaraan dilakukan secara sentralistik; 3) Peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.⁶ Teori manajemen mutu menurut Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) mengungkapkan ada lima faktor dominan atau penentu kualitas jasa disingkat TERRA, yaitu:⁷

- a. *Tangible* (berwujud), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi yang baik, menarik, terawat. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan tentang penilaian yang modern dan memadai. b. Pernyataan mengenai fasilitas fisik yang bagus, bersih, dan memadai. c. Pernyataan tentang fasilitas fisik yang menunjang kegiatan bisnis. d. Pernyataan tentang karyawan yang rapi dan sopan.
- b. *Empathy* (empati), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan tentang pelayanan kepada pelanggan secara individual. b. Pernyataan tentang perhatian karyawan secara pribadi kepada pelanggan. c. Pernyataan tentang penyediaan karyawan yang dapat bertindak sebagai penasihat pribadi. d. Pernyataan tentang pemahaman kebutuhan pelanggan. e. Pernyataan tentang mengutamakan kepentingan pelanggan.
- c. *Responsiveness* (cepat tanggap), yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan dari pelanggan. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan mengenai kecepatan pelayanan. b. Pernyataan tentang ketepatan pelayanan. c. Pernyataan tentang sikap untuk membantu pelanggan. d. Pernyataan tentang penyediaan waktu untuk melayani pelanggan.
- d. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan tentang ketepatan jasa yang diberikan. b. Pernyataan tentang kesungguhan dalam melayani pelanggan. c. Pernyataan tentang dapat dipercaya atau tidaknya

⁶ Siti Rabiah, "Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol. 16 No. 1 (2019), hal. 64, <https://doi.org/E-ISSN 2598-398X | P-ISSN 2337- 8743>.

⁷ Ade Suherman Dkk, "Meningkatkan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (2018), hal. 2–3,.

- dalam melayani pelanggan. d. Pernyataan tentang administrasi yang akurat.
- e. *Assurance* (kepastian), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada pelanggan. Pengukurannya meliputi pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki pelanggan.

Penguatan mutu pendidikan yang benar akan selalu selaras dengan tuntutan pihak manapun. Barometernya harus jelas juga, kalau tingkat mutu pendidikan kita jarang masuk dalam hitungan peringkat manapun, itu jelas indikasinya bahwa upaya atau orientasi penguatan mutu pendidikan kita masih jauh dari yang seharusnya. Berbicara mutu berarti berbicara tentang sesuatu yang ideal lepas dari pengaruh dan situasi konkret manapun. Penguatan mutu pendidikan yang dicampuradukkan dengan hal-hal lain akan berakibat fatal dan malah merusak mutu pendidikan itu sendiri, dari sinilah seharusnya titik refleksi penguatan mutu pendidikan di tanah air dimulai dan digumuli secara serius.

1. Dasar Hukum dan Kebijakan Sistem penjaminan Mutu

Dasar hukum implementasi SPM Dikti adalah UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), dimana di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembahasan Rancangan UU Dikti, yang mana disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Bab III UU Dikti cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Standar Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti).

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pasal 52 UU Dikti menyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sehingga Perguruan Tinggi diharapkan lebih mudah untuk dapat mengembangkan diri dengan adanya standar yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);

- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.⁸

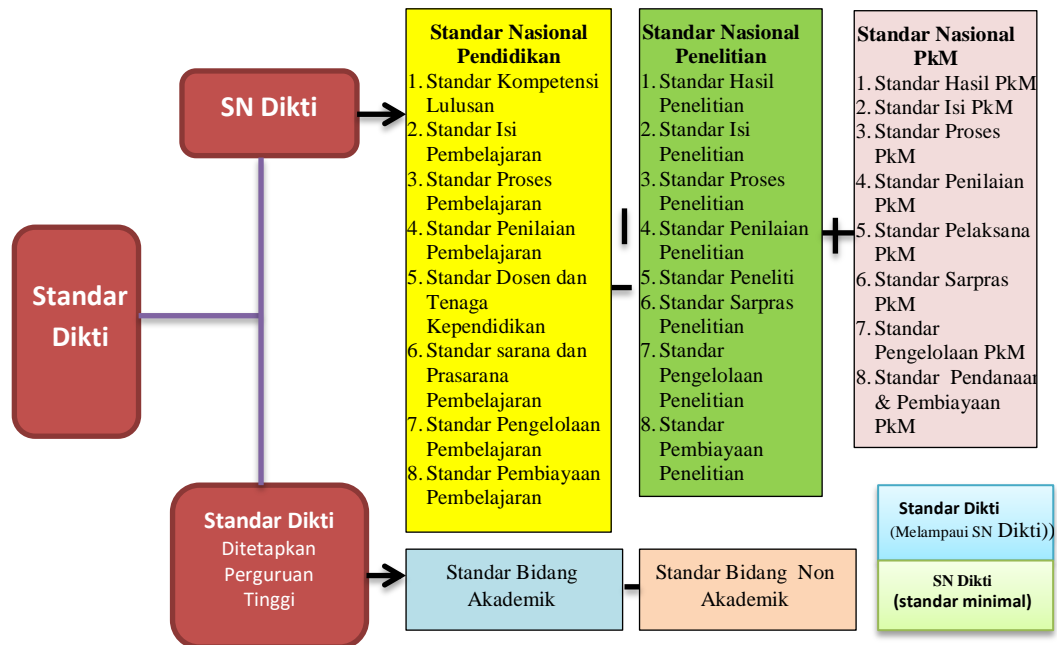
Adapun tujuan dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah menjamin pemenuhan Standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang.⁹ Budaya mutu perlu disosialisasikan secara masif agar seluruh *stakeholder* memiliki kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menjaga standarisasi mutu perguruan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.

- a. Standar Dikti terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar dalam Bidang Akademik dan Nonakademik yang melampaui SN Dikti.
- b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

⁸ Kemenristek Dikti, “Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi”, 2016, tersedia pada http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/06/small_sosialisasi_SN_Dikti_2016.pdf (2016). Diakses pada tanggal 25 November 2020

⁹ Kemristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi dan PJJ*, 2018.h.16

Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat dilihat gambar berikut.



Gambar 1. Struktur dan Pelampauan SN Dikti¹⁰

Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi baik, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi baik sekali atau unggul, sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM. Di dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tersebut, juga diatur bahwa mutu program studi atau perguruan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Dikti untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

¹⁰ Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), h.17

2. Standar Nasional Mutu Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Standar nasional pendidikan tinggi ditetapkan berdasarkan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) RI Nomor 3 tahun 2020. Di dalam UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 52 ayat (3) menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:¹¹

- 1) Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- 2) Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional PendidikanTinggi; dan
- 3) Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

a. Standar Nasional Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian

¹¹ Permendikbud, “Standar Nasional Pendidikan Tinggi”, Permendikbud No. 3 (2020).

pembelajaran (CP) lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi CP lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.¹²

2) Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CP lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CP lulusan dari KKNI. Untuk program pendidikan, lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.¹³ Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran juga harus bersifat kumulatif dan/ atau integratif serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

3) Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CP

¹² Peraturan Presiden No.8, “Indonesia, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional”, (2012).

¹³ Permendikbud, *Op.Cit.*

lulusan yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik Proses Pembelajaran diantaranya: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS hendaknya mengikat dosen dan mahasiswa ke dalam kontrak belajar atau kuliah. RPS atau istilah lain paling sedikit memuat¹⁴:

- a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e) Metode pembelajaran;
- f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i) Daftar referensi yang digunakan.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar

¹⁴ Bintang PS & Ika L, "Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi", *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 32 No. 1 (2018), h. 1, tersedia pada doi:<https://doi.org/10.21009/PIP.321.6> (2018).

tertentu. Pelaksanaan dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain. Semua hal yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Dan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses ini wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CP lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester Antara diselenggarakan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Beban Belajar dan Masa Belajar:

Progam	Beban belajar minimal (sks)	Masa belajar (tahun akademik)
Diploma I	36	Paling lama 2
Diploma II	72	Paling lama 3
Diploma III	108	Paling lama 5
Diploma IV./Sarjana Terapan dan Sarjana	144	Paling lama 7 tahun

Beban belajar mahasiswa program diploma II, program diploma III, program diploma IV/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi ($IPS > 3,00$ dan memenuhi etika akademik), setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks pada semester berikut.

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Cakupan penilaian proses dan hasil belajar meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan

integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Mekanisme penilaian dilakukan dengan:¹⁵

- a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaporan penilaian dilakukan dengan memberikan penilaian.

Tabel 3. Kategori Pelaporan penilaian

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian ini

¹⁵ Permendikbud, *Op.Cit.*

diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian CP lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian CP lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Mahasiswa yang lulus berhak mendapatkan:

- a) ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan
- b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi
- c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya,
- d) gelar, dan
- e) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan. Kewajiban Dosen diantaranya harus memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan. Adapun Beban Kerja Dosen meliputi:

- 1) kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi

- hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
 - 3) kegiatan penunjang.
 - 4) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 - 5) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
 - 6) Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁶

Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap: merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap dalam perguruan tinggi lebih dari 60% dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi yaitu memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

¹⁶ *Ibid.*

6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CP lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Standar Prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.¹⁷ Lahan perguruan tinggi harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status hak pakai atas nama pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak pakai bagi PTN, sedangkan untuk PTS harus memiliki hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas

¹⁷ *Ibid.*

minimal kelas A atau setara. Disamping itu juga harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa yang Berkebutuhan Khusus antara lain: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/ denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.¹⁸ Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Kewajiban Unit Pengelola Program Studi dalam hal pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;

¹⁸ *Ibid.* Pasal 40

- 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CP lulusan;
- 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- 5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;

Adapun Kewajiban Perguruan Tinggi dalam hal pengelolaan pembelajaran adalah:

- a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;

- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- f) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan CP lulusan.¹⁹ Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun. Bagi PTN ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan

¹⁹ *Ibid.* Pasal 42

mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; serta indeks kemahalan wilayah menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Kewajiban perguruan tinggi dalam hal pembiayaan pembelajaran yaitu mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain dari hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

b. Standar Nasional Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.²⁰ Di samping itu juga harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2) Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.²¹ Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat

²⁰ *Ibid.* Pasal 46

²¹ *Ibid.* Pasal 47

baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3) Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain itu kegiatan ini harus juga harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

4) Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling

sedikit: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5) Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Peneliti harus mampu menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang juga harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7) Standar Pengelolaan Penelitian:

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Kewajiban Kelembagaan Penelitian yaitu:

- a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e) melakukan diseminasi hasil penelitian;

- f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
- g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.²²

Kewajiban perguruan tinggi dalam hal penelitian:

- a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.²³

8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.²⁴ Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai

²² *Ibid.* Pasal 53

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* Pasal 54

perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁵ Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

²⁵ *Ibid.* Pasal 57

2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a) Hasil penelitian yang diperoleh dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- c) Teknologi tepat guna yang dikembangkan dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.
- d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang ditemukan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.²⁶

3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.²⁷ Bentuk kegiatan PKm meliputi pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas

²⁶ *Ibid.* Pasal 58

²⁷ *Ibid.* Pasal 59

masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Kegiatan ini juga harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria /minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Prinsip Penilaian Proses dan Hasil PkM yaitu:

- a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.²⁸

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

²⁸ *Ibid.* Pasal 60

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi

- a) tingkat kepuasan masyarakat;
- b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pkm wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pkm merupakan fasilitas PT yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. Standar sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM. Kelembagaan pengelola PkM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Kewajiban Kelembagaan Pengelola PkM diantaranya:

- a) Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi;

- b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
- e) Melakukan diseminasi hasil PkM;
- f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
- g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
- h) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. dan menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.²⁹

Kewajiban perguruan tinggi dalam Pengelolaan PkM harus:

- a) Memiliki renstra PkM yang merupakan bagian dari renstra Perguruan Tinggi;
- b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pkm paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
- e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
- f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM;
- g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
- h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui PD Dikti.³⁰

Kewajiban yang sudah tertera di dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 harus dijalankan dengan istiqomah dan penuh tanggungjawab,

²⁹ *Ibid.* Pasal 63

³⁰ *Ibid.* Pasal 64

sehingga benar-benar dapat dirasakan kehadiran dan kebermanfaatannya untuk masyarakat.

8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

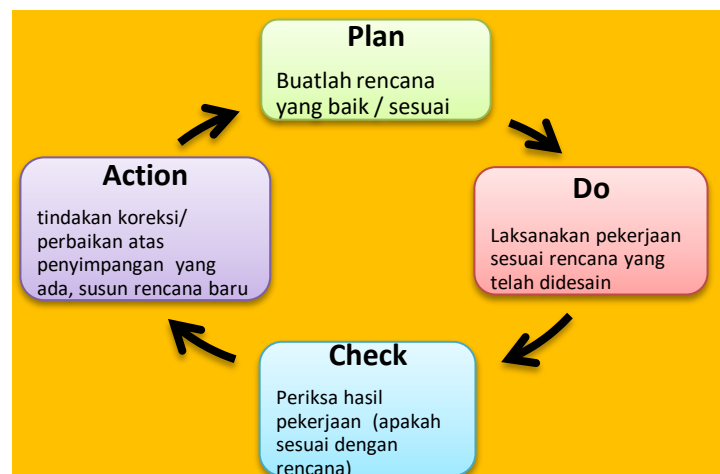
Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk PkM. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan PkM; pengendalian PkM; pemantauan dan evaluasi PkM; pelaporan PkM; dan diseminasi hasil PkM. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan PkM yang digunakan untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

3. Teori Mutu Pendidikan

a. William Edwards Deming (14 Oktober 1900 – 20 Desember 1993)

Deming mempopulerkan siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) yang merupakan suatu proses pemecahan masalah yang terdiri dari empat

langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas.³¹ Deming selalu merujuk metode ini sebagai siklus shewhart, belakangan Deming telah memodifikasi PDCA menjadi PDSA (*Plan, Do, Study, Act*). Siklus Deming (*Deming Cycle*) dikembangkan untuk menghubungkan antara produksi suatu produk dengan kebutuhan pelanggan dan mengfokuskan pada sumber daya semua departemen (riset, desain, produksi dan pemasaran) dalam usaha kerjasama untuk memenuhi kebutuhan *customer*.³²



Gambar 2. siklus PDCA

1) *Plan* (Rencanakan)

Yaitu meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Tahap *plan* adalah tahap untuk menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan proses ataupun permasalahan yang ingin dipecahkan, kemudian menentukan metode yang akan

³¹ Wikipedia, "PDCA", n.d., tersedia pada <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada 22 Juni 2020

³² Mu'alimin, *Menjadi Sekolah Unggul*, (1 ed.) (Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2014). h.71

digunakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Dalam tahap *plan* ini juga meliputi pembentukan Tim Peningkatan Proses (*Process Improvement Team*) dan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang berada di dalam tim tersebut serta batas-batas waktu (jadwal) yang diperlukan untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang telah ditentukan. Perencanaan terhadap penggunaan sumber daya lainnya seperti biaya dan mesin juga perlu dipertimbangkan dalam tahap *plan* ini. Rencana perbaikan disusun berdasarkan prinsip 5-W (*why, what, who, when dan where*) dan 1-h (*how*), kemudian dalam menetapkan sasaran dan target harus dengan memperhatikan prinsip (*smart, measureable, attainable, reasonable dan time*).

2) *Do* (Kerjakan)

Yaitu *implementasi* proses. Tahap *Do* adalah tahap penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan di tahap *plan* termasuk menjalankan prosesnya, memproduksi serta melakukan pengumpulan data (*data collection*) yang kemudian akan digunakan untuk tahap *check* dan *act*. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian yaitu upaya agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat dicapai. Langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a) Merencanakan suatu proyek uji coba dengan cara merencanakan sumber daya manusia, sumber dana, dan

sebagainya, merencanakan rencana kegiatan (*plan of action*);

- b) Melaksanakan Pilot *Project* yang dilaksanakan dalam skala kecil dengan waktu relatif singkat (± 2 minggu)

3) *Check* (Cek)

Yaitu memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya. Tahap *check* adalah tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap *Do*. Melakukan perbandingan antara hasil aktual yang telah dicapai dengan target yang ditetapkan dan juga ketepatan jadwal yang telah ditentukan. Untuk melakukan pemantauan rencana dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Evaluasi hasil proyek (bertujuan untuk efektivitas proyek tersebut), membandingkan target dengan hasil pencapaian proyek (data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan data harus sama), target yang ingin dicapai 80%, teknik yang digunakan: *observasi* dan *survey*, alat yang digunakan: kamera dan kuisioner;
- b) Membuat kesimpulan proyek (hasil menjanjikan namun perlu perubahan, jika proyek gagal cari penyelesaian lain, jika proyek berhasil selanjutnya dibuat rutinitas).

4) *Act* (Tindak Lanjut)

Yaitu menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang dibutuhkan. Tahap *act* adalah tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap *check*. Terdapat 2 jenis Tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapainya, antara lain pertama, tindakan perbaikan (*Corrective Action*) yang berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian target, tindakan perbaikan ini perlu diambil jika hasilnya tidak mencapai apa yang telah ditargetkan. Kedua, tindakan standarisasi (*Standardization Action*) yaitu tindakan untuk menstandarisasikan cara ataupun praktek terbaik yang telah dilakukan, tindakan standarisasi ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Siklus tersebut akan kembali lagi ke tahap *plan* untuk melakukan peningkatan proses selanjutnya sehingga terjadi siklus peningkatan proses yang terus menerus (*Continuous Process Improvement*).³³

Siklus PDCA memiliki manfaat antara lain:

- 1) Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggungjawab dari sebuah organisasi;
- 2) Digunakan sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi;
- 3) Untuk menyelesaikan dan mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang beruntun dan sistematis;
- 4) Sebagai kegiatan *continuous improvement* dalam rangka memperpendek alur kerja;
- 5) Menghilangkan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas.³⁴

³³ Teknik Elektronika, "Pengertian Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act)", Diakses pada 22 Oktober, 2020, tersedia pada <https://teknikelektronika.com/pengertian-siklus-pdca-plan-do-check-act/> (2020).

Hasil pemikiran Edward Deming terkait empat belas perkara hakekat mutu di adopsi ke dalam pendidikan menjadi Hakikat Mutu dalam Pendidikan, yang meliputi:³⁵

- 1) Menciptakan Konsistensi Tujuan.
Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan pada siswa. Menjadikan sekolah menjadi sekolah yang mampu bersaing (kompetitif) dan berprestasi. Menumbuhkan secara terus menerus tekad yang kuat dan membuat rencana jangka panjang berdasarkan visi ke depan serta membuat inovasi baru untuk memperbaiki mutu.
- 2) Mengadopsi Filosofi Mutu Total.
Setiap *stakeholder internal* harus meningkatkan keterampilan guna menemukan inovasi baru untuk mendukung revolusi mutu. Setiap orang bertanggungjawab untuk memperbaiki mutu baik produk maupun jasa yang diberikan pada kostumer internal dan eksternal. Setiap orang menjalankan melakukan pekerjaan dengan efisien dan produktif, sehingga harus selalu melaksanakan prinsip-prinsip mutu yang menggunakan cara-cara atau metode baru dalam bekerja .
- 3) Mengurangi Kebutuhan Pengujian.
Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi masal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Menciptakan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu. Untuk menghasilkan produk yang bermutu harus bisa menjaga konsistensi kinerja dengan ada atau tidaknya pengawasan. Setiap orang harus memiliki tekad untuk menciptakan produk/ jasa yang berkualitas.
- 4) Menilai Bisnis Sekolah dengan Cara Baru.
Meminimalkan kebutuhan operasional biaya pendidikan dengan meningkatkan kualitas kerjasama dengan orang tua siswa dan berbagai lembaga terkait. Menghentikan hubungan yang berdasar pada harga. Harga harus terkait dengan nilai kualitas produk/ jasa.
- 5) Memperbaiki Mutu dan Produktivitas serta Mengurangi Biaya.
Memperbaiki mutu dan produktivitas, sehingga mengurangi biaya dengan cara membuat perencanaan yang komprehensif, meliputi proses, evaluasi dan implementasi disemua bidang. Perbaikan-perbaikan harus dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam setiap kegiatan.
- 6) Belajar Sepanjang Hayat.
Untuk memperbaiki kinerja diperlukan suatu perlakuan/ kegiatan yang mendukung peningkatan, seperti pelatihan bersama agar terjadi perkembangan kemampuan untuk menghasilkan produk yang

³⁴ W. Edwards Deming, *Out Of The Crisis*, (London, England: MIT Center for Advanced Educational Service, 1986). h.67

³⁵ Jerome S. (Terjemah: Yosol Iriantara) Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006). h.85-89

berkualitas. Lembaga pelatihan sambil bekerja (*on the job training*), karena pelatihan adalah cara yang dahsyat untuk mengembangkan kualitas kinerja pada semua tingkatan dalam unsur lembaga.

7) Kepemimpinan dalam pendidikan

Pemimpin pendidikan perlu mengembangkan visi misi yang didukung oleh seluruh stakeholder sekolah. Visi misi harus mencerminkan mutu yang ingin dicapai bersama. Seorang pemimpin harus membantu setiap orang untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik yaitu dengan membina, memfasilitasi, membantumengatasi kendala, dan lain-lain.

8) Mengeliminasi Rasa Takut

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, demokratis dan ilmiah dapat menumbuhkan rasa percaya diri setiap anggota masyarakat sekolah, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif. Menghilangkan sumber-sumber penghalang komunikasi yang baik antar individu atau kelompok dalam lembaga.

9) Mengeliminasi Hambatan Keberhasilan

Meminimalisasi munculnya masalah yang dapat menghambat pencapaian keberhasilan dengan cara memperkuat budaya kerja tim (*team work*), mengubah strategi dan kegiatan kompetisi menjadi kolaborasi dengan kelompok lain, mengubah prinsip kalah-menang menjadi menang-menang, mengisolasi pemecahan masalah menjadi bersama-sama memecahkan masalah, memonopoli informasi menjadi berbagi informasi, bertahan atau mati menjadi menyambut baik perubahan. Dengan menghilangkan semua sumber-sumber yang menyebabkan orang merasa takut dalam organisasi maka mereka akan dapat bekerja secara efektif dan efisien.

10) Menciptakan Budaya Mutu

Menciptakan budaya mutu dilakukan dengan membangun kemandirian dan rasa tanggungjawab pada setiap orang. Menghilangkan budaya yang membuat jarak antara atasan dan bawahan, seperti memerintah dengan kemarahan. Karena hal ini akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara atasan dan bawahan, atau lebih jauh lagi akan menjadi sebab rendahnya mutu dan produktivitas pada sistem organisasi, bawahan hanya bekerja sekedar memenuhi kewajiban saja.

11) Perbaikan Proses

Proses adalah sesuatu yang dinamis, dimana di dalamnya terdapat peluang untuk terus mengalami perbaikan. Solusi yang dipandang baik harus diterapkan tanpa secara optimal. Di dalam suatu proses, pencarian solusi terbaik adalah hal yang harus didahulukan daripada mencari-cari kesalahan. Menghargai orang atau kelompok yang mendorong terjadinya perbaikan. Berkerja dengan menekankan pada target kuantitatif seringkali melupakan kualitas.

12) Membantu Siswa Berhasil

Mengedepankan upaya bersama untuk mendukung keberhasilan siswa dengan jalan memberikan hak kepada siswa, guru atau

administrator sekolah. Menumbuhkan rasa bangga pada hasil kerja sehingga para siswa dapat menyelesaikan tugas/ pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Menghilangkan penghalang yang merebut/ merampas hak para pimpinan dan pelaksana untuk bangga dengan hasil kerja masing-masing.

13) Komitmen

Seorang pemimpin harus memiliki komitmen terhadap budaya mutu. Berkemauan untuk mendukung dan memperkenalkan cara baru dalam mengerjakan sesuatu di dalam suatu sistem pendidikan. Pimpinan lembaga harus memiliki komitmen dan konsisten dalam bekerja, serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam membantu penyelesaian suatu masalah yang dihadapi karyawan.

14) Tanggung Jawab

Seluruh *stakeholder* diberi kesempatan untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Melibatkan semua orang yang ada di dalam lembaga untuk dalam proses transformasi menuju peningkatan mutu. Menciptakan struktur yang memungkinkan semua orang bisa turut serta dalam usaha perbaikan mutu produk/ jasa yang diusahakan.

Semua itu terbangun dan berjalan maksimal jika faktor kepemimpinan secara kelembagaan dan struktural mampu menggerakkan staf dengan baik untuk mencapai tujuan. Menurut Deming, mutu pendidikan yang rendah dapat disebabkan karena tidak terpenuhi beberapa syarat seperti, desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang tidak teratur dengan baik, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Selain itu juga bisa juga karena kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan.³⁶

Berdasarkan paparan pemikiran Deming tentang peningkatan mutu, maka menurut peneliti ada beberapa asumsi dasar yang digunakan

³⁶ Edward Deming, *Op.Cit.* h. 6

dalam konsep pemikiran Deming di antaranya Pertama, dapat dilihat bahwa pendekatan sementara awalnya memfokuskan perhatian pada proses yang ada untuk mendapatkan perbaikan, kemudian segera mencari penyebab khusus kegagalan. Setelah menemukan penyebab kegagalan dengan secepatnya kembali fokus pada proses manajemen dan sikap. Deming tampaknya percaya bahwa perubahan sebagai upaya dalam rangka untuk perbaikan berkelanjutan yang ingin dicapai. Kedua, adalah asumsi bahwa metode statistik, harus digunakan dengan benar, sehingga memberikan bukti kuantitatif untuk mendukung perubahan. Ketiga, adalah bahwa perbaikan terus-menerus keduanya mungkin dan harus dilakukan.

b. Joseph Juran (24 Desember 1904 – 28 Februari 2008)

Pada tahun 1986 Juran mengembangkan konsep yang terkenal dengan teori Trilogi Kualitas (*The Quality Trilogy*). Juran mengemukakan kerisauannya akan perkembangan manajemen kualitas dunia saat itu dengan pernyataannya bahwa “telah terjadi krisis kualitas”. Ia mempunyai pemahaman bahwa cara tradisional tidak akan mampu lagi menghadapi krisis kualitas yang terjadi. Pada tahun 1986, Juran mengawali karirnya di perusahaan Western Electric dan mempublikasikan Trilogi Kualitas (*The Quality Trilogy*), dengan mengidentifikasi aspek ketiga dalam manajemen kualitas yakni perencanaan kualitas (*quality planning*). Hal ini merupakan terobosan baru pada saat itu, dimana manajemen kualitas pada dunia industri sebelumnya hanya mengenal dua aspek kualitas yang dikenal yaitu pengendalian kualitas (*quality control*) dan perbaikan kualitas (*quality improvement*). Menurut Juran kualitas adalah kecocokan

penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan³⁷. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu teknologi berkaitan dengan kekuatan, psikologis adanya rasa atau status, waktu berkaitan dengan kehandalan, kontraktual yaitu ada jaminan, etika memiliki sopan santun.

Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara produsen menilai dan mencegah kemungkinan-kemungkinan produk gagal yang akan dipasarkan di masyarakat karena tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Penurunan tingkat kegagalan harus mendekati nol persen sehingga memberi peningkatan pada kualitas produk. Akibatnya nilai suatu barang/jasa akan meningkat dipasaran dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Begitupun pada perguruan tinggi harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan hasil lulusan yang menyebabkan lulusan menjadi pengangguran, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi dengan cepat. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep mutu trilogi kualitas Juran dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3. Trilogi Kualitas

³⁷ Suyadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).h.5

- 1) Perencanaan Kualitas (*quality planning*), adalah suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat, kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan.
- 2) Pengendalian Kualitas (*quality control*), adalah suatu proses dimana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Misalnya mesin-mesin rusak segera diperbaiki.
- 3) Perbaikan Kualitas (*quality improvement*), adalah suatu proses dimana mekanisme yang sudah sesuai dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, menugaskan orang-orang untuk menyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu dan pada umumnya menetapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya.

Perencanaan kualitas yang baik akan sangat bermanfaat bagi dunia industri dalam menetapkan serta membuat langkah strategis agar para konsumen terpuaskan melalui ketersediaan dan pemakaian produk yang berkualitas. Juran menggambarkan sebuah sistem manajemen mutu yang berkaitan antara perencanaan, pengendalian dan perbaikan atau peningkatan kualitas. Isi pokok perencanaan mutu ialah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelanggan, menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam program kegiatan, dan menyusun langkah-langkah dalam proses

pelaksanaan program untuk menghasilkan produk yang bermutu. Menurut Juran Kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*), ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Perencanaan mutu menjadi proses awal dalam suatu siklus manajemen kualitas. Trilogi Juran (1986) menunjukkan tiga proses penting yang saling terkait, yaitu *quality planning, quality control, dan quality improvement*.³⁸

Juran juga memberikan langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas dengan menggunakan sepuluh langkah (*Ten Steps to Quality Improvement*) yaitu³⁹:

- 1) Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk melakukan perbaikan.
- 2) Menetapkan tujuan perbaikan.
- 3) Mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Menyediakan pelatihan.
- 5) Melaksanakan proyek-proyek yang bertujuan untuk pemecahan masalah.
- 6) Melaporkan perkembangan.
- 7) Memberikan penghargaan.
- 8) Mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai.
- 9) Menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai.
- 10) Memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem reguler perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas mutu merupakan upaya simultan tingkat satu dan tingkat dua. Juran mendefinisikan mutu berdasarkan makna ganda. Pertama kualitas terdiri dari fitur-fitur produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memberikan kepuasan produk. Kedua, kualitas terdiri dari terbebasnya produk dari kekurangan. Poin penting definisi mutu menurut Juran yaitu definisi praktis kualitas mungkin tidak mungkin dan kualitas terkait dengan kebutuhan pelanggan,

³⁸ Joseph Juran, "The Juran Trilogy", *Journal Quality Progress*, Vol. 19 (1986).h.19

³⁹ Mu'alimin, *Op.Cit.*h.79

kemampuan untuk memenuhinya menunjukkan adanya kesesuaian dengan karakteristik yang terukur.

c. Philip B. Crosby (18 juni 1926 – 18 Agustus 2011M)

Crosby terkenal dengan konsep manajemen *zero defect* dan pencegahan, yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik (*acceptable quality level*). Ia juga dikenal dengan *quality vaccine* dan *Crosby fourteen step to quality improvement*. Dalil yang digunakan oleh Crosby dalam memahami manajemen kualitas adalah:⁴⁰

- 1) Kualitas adalah sama dengan persyaratan. Pada awalnya kualitas diterjemahkan sebagai tingkat kebagusan atau kebaikan (*goodness*). Definisi ini memiliki kelemahan, yaitu tidak menerangkan secara spesifik baik atau bagus itu bagaimana. Definisi kualitas menurut Crosby adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan (*conformance to requirement*). Kurang sedikit saja dari persyaratannya maka suatu barang atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Persyaratan itu sendiri dapat berhasil sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber, pemerintah, teknologi serta pasar atau persaingan.
- 2) Sistem kualitas adalah pencegahan. artinya sistem kualitas adalah penilaian dan perlu untuk melakukan pencegahan terhadap produk yang kurang bagus atau cacat.
- 3) Kerusakan nol (*zero defect*) merupakan suatu standar kinerja yang harus digunakan. Artinya sebisa mungkin untuk menghindari kerusakan saat pertama dan setiap kali produksi.
- 4) Ukuran kualitas adalah *price of nonconformance*. artinya kualitas merupakan sesuatu yang harus dapat diukur, dan biaya yang dikeluarkan juga bisa terukur.

Menurut pendapat Crosby ada empat belas langkah yang harus dilakukan dalam rangka untuk peningkatan mutu:⁴¹

- 1) Komitmen manajemen (*management commitment*), Menjelaskan bahwa manajemen bertekad meningkatkan kualitas untuk jangka panjang.

⁴⁰ Philip Crosby, *Quality Is Free*, (New York: McGraw-Hill, 1979).h.5

⁴¹ Daniel Hunt, *Managing for Quality*, (Illinois: Businessone Irwin, 1992).h.64

- 2) Tim peningkatan mutu (*quality improvement team*), Membentuk tim kualitas antar departemen.
- 3) Pengukuran mutu (*quality measurement*), Mengidentifikasi sumber terjadinya masalah saat ini dan masalah potensial.
- 4) Mengukur biaya mutu (*the cost of quality*), Menilai biaya kualitas dan menjelaskan bagaimana biaya itu digunakan sebagai alat manajemen.
- 5) Membangun kesadaran mutu (*quality awareness*), Meningkatkan kesadaran akan kualitas dan komitmen pribadi pada semua karyawan.
- 6) Kegiatan perbaikan (*corrective actions*), Melakukan tindakan dengan segera untuk memperbaiki masalah-masalah yang telah diperbaiki.
- 7) Perencanaan tanpa cacat (*zero defect planning*), Mengadakan program *zero defects*.
- 8) Pelatihan pengawas (*supervisor training*), Melatih para penyelia untuk bertanggungjawab dalam program kualitas tersebut.
- 9) Hari tanpa cacat (*zero defect day*), Mengadakan *zero defect day* untuk meyakinkan seluruh karyawan agar sadar adanya arah baru.
- 10) Penyusunan tujuan (*goal setting*), Mendorong individu dan tim untuk membentuk tujuan perbaikan pribadi dan tim.
- 11) Penghapusan sebab kesalahan (*error cause removal*), Mendorong para karyawan untuk mengungkapkan kepada manajemen apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam upaya mencapai tujuan kualitas.
- 12) Pengakuan (*Recognition*), Mengakui/ menerima para karyawan yang berpartisipasi.
- 13) Dewan-dewan mutu (*quality councils*), Membentuk dewan kualitas untuk mengembangkan komunikasi secara terus menerus.
- 14) Lakukan lagi (*do it over again*), Mengulangi setiap tahap tersebut, karena perbaikan kualitas adalah proses yang tidak pernah berakhir.

Asumsi mutu yang dipergunakan dalam pendekatan Crosby sebagai berikut: Asumsi pertama, dapat dilihat dengan jelas bahwa Crosby memfokuskan perhatian pada proses manajemen sebagai pendorong utama kualitas. Artinya, jika proses manajemen tidak berfungsi untuk mencapai kualitas, maka kualitas produk atau layanan tidak akan muncul. Asumsi kedua, adalah bahwa nol cacat (*zero defect*) merupakan tujuan yang dicapai. Implikasi disini adalah bahwa produk handal apapun dapat dibuat,

dalam *volume* yang *relevan*, sepenuhnya bebas dari cacat. Menurut Crosby bahwa kesesuaian produk dengan persyaratan adalah bebas cacat. Ini menunjukkan pentingnya spesifikasi produk dalam menentukan kualitas. Asumsi ketiga, adalah untuk membangun sebuah perusahaan yang bebas kesalahan, dimana kesalahan yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa mutu adalah sesuai dengan persyaratan, yang merupakan satu tingkat untuk formulasi. Hal yang ditekankan dalam mutu yaitu: seseorang harus tahu apa yang menjadi persyaratan dan mampu menerjemahkan persyaratan menjadi produk terukur atau karakteristik layanan, serta perlu untuk mengukur karakteristik produk atau jasa untuk menentukan kualitas yang tinggi.

d. ISHIKAWA (13 Juli 1915 - 16 April 1989)

Ishikawa memperoleh gelar doktor dibidang teknik. Dia dikenal dengan karyanya tentang lingkaran kualitas yang juga merupakan pelopor gerakan lingkaran kualitas di Jepang pada awal tahun 1960-an, hingga lingkaran kualitas inipun menyebar ke dunia pendidikan menjadi manajemen mutu terpadu. Lingkaran kualitas berkaitan erat dengan penggunaan kemampuan manusia secara maksimal untuk mencapai tujuan. Semua *stakeholder* di dalam lingkaran kualitas harus terlibat dalam pengembangan diri, namun mereka tidak menerima imbalan/ hasil secara langsung untuk setiap capaian perbaikan yang dicapai. Hal ini menyebabkan lingkaran kualitas pada keadaan tertentu tidak berhasil.⁴²

⁴² Edward Deming, *Op.Cit.* h. 49-50

Ishikawa sangat memperhatikan paradigma dan cara berpikir orang dalam bekerja. Ia ingin mengubah pola pikir tradisional yang usang. Ia mendorong manajer untuk terpaku hanya kepada meningkatkan kualitas produk, lalu selesai. Menurutnya, *quality improvement* adalah langkah-langkah yang berkelanjutan dan harus selalu dilakukan. Gagasannya mengenai *quality control* di seluruh sendi perusahaan terwujud menjadi kebijakan pelayanan pelanggan yang berkelanjutan. Kaoru Ishikawa adalah pencetus dari *Fishbone Diagram*, atau dikenal juga sebagai Ishikawa Diagram. Diagram ini menerangkan sebab dari suatu kejadian yang spesifik, dan pertama kali digagas pada 1968. Fungsinya adalah untuk mengetahui faktor potensial yang menyebabkan efek berupa cacat atau masalah lainnya. Setiap penyebab masalah adalah sumber variasi. Penyebab-penyebab ini umumnya dibagi menjadi enam kategori yaitu Manusia, Metode, Mesin, Material, Pengukuran dan Lingkungan.

Konsep dasar Fishbone Diagram sebenarnya pertama kali digunakan pada tahun 1920-an, dan menjadi salah satu dari tujuh perkakas dasar dari *quality control*. Disebut demikian karena bentuknya yang menyerupai tulang ikan, dan seringkali digunakan pada proses perancangan produk dan pencegahan cacat kualitas produk. Dengan Fishbone Diagram, Ishikawa melakukan pergerakan signifikan dan spesifik di bidang *quality improvement*. Dengan menggunakan diagram tersebut, pengguna bisa melihat semua penyebab yang mungkin dari suatu hasil, dan diharapkan bisa menemukan akar masalah yang menyebabkan ketidaksempurnaan proses. Dengan memberikan jalan menuju akar

masalah, diagram ini menjadi salah satu solusi peningkatan kualitas mulai dari akar hingga ke permukaan.

Edwards Deming salah satu kolega Ishikawa, mengadopsi diagram ini dan mengajarkannya sebagai salah satu bagian dari konsep *Total Quality Control* di Jepang pada awal Perang Dunia II. Fishbone Diagram kemudian dikenal sebagai salah satu *tool* pertama dalam proses manajemen kualitas. Kaoru Ishikawa juga menekankan pentingnya penggunaan tujuh perkakas kualitas, yaitu *control chart*, *run chart*, *histogram*, *scatter diagram*, *Pareto chart* dan *flowchart*. Ishikawa percaya akan pentingnya dukungan dan kualitas kepemimpinan dari manajemen atas. Karena tanpa dukungan dari pimpinan, program apapun bisa dipastikan akan gagal. Ishikawa menekankan bahwa untuk menggali seluruh potensi kesuksesan perusahaan, komitmen dari seluruh hirarki perusahaan sangat dibutuhkan. Ishikawa juga memperkaya metodenya dengan mengadopsi berbagai metode yang dicetuskan oleh kualitas guru yang lain, seperti Deming dengan siklus PDCA-nya. Area *quality improvement* lain yang dijelajahi Ishikawa berkaitan dengan siklus hidup produk, tidak hanya pada saat proses produksi berlangsung, namun muaranya adalah pada kepuasan pelanggan.

Berdasarkan penjelasan dia atas Ishikawa sangat menyarankan untuk menerapkan standar-standar, namun standar seperti halnya program *continuous improvement*, harus secara konstan dievaluasi dan disesuaikan. Menurut ajarannya, standar bukanlah sumber utama dalam pengambilan keputusan. Kepuasan pelangganlah yang harus menjadi

pertimbangan utama. Ia mengajarkan kepada para manajer untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan. Berdasarkan kebutuhan pelanggan, seluruh keputusan harus dibuat.

e. Arman V. Feigenbaum (6 April 1920 – 13 November 2014)

Armand Feigenbaum adalah pencetus *Total Quality Control*. Dia melihat kontrol kualitas lebih sebagai metode bisnis daripada teknis, dan percaya kualitas telah menjadi kekuatan paling penting yang mengarahkan kepada keberhasilan dan pertumbuhan organisasi. Bagi Feigenbaum, tanggung jawab untuk *Total Quality Control* (TQC) harus dibagi bersama-sama dan seharusnya tidak mengandalkan fungsi kepastian kualitas (*Quality Assurance*) atau pengendalian kualitas secara tersendiri. Feigenbaum juga mengklarifikasi ide dari biaya mutu (*QualityCost*) dan dia salah satu yang pertama kali berargumentasi bahwa kualitas yang lebih baik, dalam jangka panjang adalah yang lebih murah. Feigenbaum menyatakan bahwa kualitas adalah “*whatever the buyer says it is*”, yaitu apa yang dikatakan oleh pelanggan.

Kualitas dinilai telah menjadi kekuatan paling penting yang mengarah ke keberhasilan organisasi dan pertumbuhan perusahaan di pasar nasional dan internasional. Feigenbaum menjadikan kualitas sebagai cara bagi perusahaan untuk benar-benar fokus pada pelanggan. Semakin baik kualitas suatu produk atau layanan, maka akan semakin rendah biayanya. Dengan kata lain apabila perusahaan meningkatkan kualitas produk dan layanannya maka perusahaan akan dapat menekan biaya sehingga dapat menjaga harga produknya.

Kualitas kontrol itu sendiri didefinisikan sebagai “Sebuah sistem yang efektif untuk mengkoordinasikan pemeliharaan kualitas dan upaya perbaikan kualitas berbagai kelompok dalam suatu organisasi sehingga memungkinkan produksi pada tingkat yang paling ekonomis yang memungkinkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.” Ia menekankan bahwa kualitas bukan berarti harga terbaik tetapi yang terbaik untuk penjualan dan penggunaan pelanggan. Kontrol dalam pengendalian kualitas merupakan alat manajemen dengan 4 langkah, yaitu menetapkan standar kualitas, menilai kesesuaian dengan standar ini, bertindak ketika standar terlampaui dan perencanaan untuk perbaikan dalam standar. Menurut Feigenbaum mutu produk atau jasa diartikan sebagai keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembuatan dan pemeliharaan yang membuat produk atau jasa digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan.

Berdasarkan pemikiran Feigenbaum di atas, maka mutu adalah produk komposit total dan layanan karakteristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Adapun poin penting dalam teori ini adalah: 1) kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan, 2) kualitas merupakan multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif, dan 3) mutu adalah dinamis, karena adanya perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan.

4. Mutu dalam Perspektif Islam

Konsep penjaminan mutu telah diajarkan di dalam Islam. Mutu sendiri merupakan realisasi dari *ihsan* yaitu berbuat baik kepada semua makhluk, karena Allah SWT telah berbuat baik kepada manusia dengan segala nikmatNya, sehingga manusia dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Ihsan berasal dari kata *husn* yang dapat diartikan menunjuk pada kualitas yang baik dan indah. Kata *husn* dalam pengertian yang umum artinya setiap kualitas yang positif (kebajikan, ramah, kejujuran, indah, menyenangkan, selaras, dll).⁴³ Ihsan dalam Bahasa Arab artinya kesempurnaan atau terbaik. Dalam terminologi ilmu tasawuf, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah SWT seolah-olah ia melihatNya, namun jika tak mampu maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah SWT melihat perbuatannya. Ihsan menunjukkan suatu kondisi kejiwaan manusia, berupa penghayatan bahwa dirinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah STW sehingga dapat melahirkan sikap hati-hati, waspada dan terkendalikannya suasana jiwa.

Kata ihsan adalah sebuah kata kerja yang berarti berbuat atau menegakkan sesuatu yang baik atau indah. Al- Qur'an menggunakan kata ini sebanyak 70 ayat dalam bentuk aktifnya (*fa'il*) muhsin (orang yang mengerjakan sesuatu yang indah). Secara menonjol ia sering menunjuk pada Tuhan sebagai pelaku sesuatu yang indah, sehingga Muhsin

⁴³ Shaciko Murata & William C, *Trilogi Islam: Islam, Iman dan ihsan*, Terj: Ghuftron A, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 294

merupakan salah satu dari nama-nama Allah.⁴⁴ Sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S Al- Qashash: 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِنِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴⁵

Konsep mutu dalam Islam juga terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S Al- Kahfi: 30:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”⁴⁶

Amal saleh dalam konteks ayat di atas dalam ilmu manajemen pendidikan Islam dimaksudkan sebagai pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

⁴⁴ *Ibid*, h.297.

⁴⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”. (Bandung: PT Sygm a Examedia Arkanleema, 2009), h. 394.

⁴⁶ *Ibid*, h. 297

Pekerjaan yang telah dilakukan dengan sempurna tentu hasil yang diperoleh dapat dicapai dengan optimal.

Sesuatu dikatakan bermutu dalam konteks manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam, jika memberikan kebaikan, baik kepada dirinya sendiri (lembaga pendidikan itu sendiri) maupun kepada orang lain (*stakeholder* dan pelanggan). Maksud dari memberikan kebaikan tersebut adalah mampu memuaskan pelanggan sebagai pengguna. Kualitas pendidikan bukan sesuatu yang ditempelkan dari luar, tetapi suatu proses *internal* terus menerus untuk mencapai idealismenya sendiri dan bukan demi memenuhi kriteria dan idealisme pihak lain. Perguruan tinggi bisa dikatakan bermutu jika memang telah memenuhi standar, misi utama dari sebuah institusi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya.⁴⁷

Sangat penting menggali berbagai potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dalam meningkatkan mutu dan memberikan pelayanan yang terbaik. Berbagai usaha, uji coba dan inovasi perlu dilakukan dalam mencari dan mengembangkan kekuatan ataupun menemukan peluang untuk mencapai visi misi perguruan tinggi, oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh *stakeholder* dalam mewujudkannya. Aktivitas manajerial dalam organisasi dengan berdasarkan pada kerjasama sebagai proses mencapai tujuan dijelaskan dalam Q.S As- Saff:4.

⁴⁷ Rita Prima Bendriyanti, "Manajemen Mutu Layanan Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Di Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Bengkulu", *Jurnal TARBAWI*, Vol. 1 No. 1 (2015), h. 9.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.⁴⁸

Hal ini sebagaimana yang ditekankan oleh Rasulullah SAW pada masa berdakwah dikota Madinah, tempat surah ini diturunkan. Pengokohan organisasi dan kejamaahan adalah titik tekan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, sedangkan di kota Mekah Rasulullah lebih fokus dan menekankan pada pengokohan aqidah dan ruhiyah. Ada lima konsep dasar yang harus ada untuk mewujudkan organisasi yang kokoh, yaitu kesesuaian konsep dan pelaksanaan organisasi, solidalitas tim, ketepatan mengukur dan mengetahui kekuatan dan tantangan, kesungguhan dalam bekerja dan berjuang, dan memiliki kader militan (solid).⁴⁹

Pendidikan tinggi yang bermutu tidak akan bekerja secara sembarangan dan acuh tak acuh, ada aturan-aturan serta kebijakan dalam rangka menciptakan pendidikan yang bermutu tinggi dimana setiap *stakeholders* dituntut untuk memberikan hasil yang terbaik. Semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk melaksanakan dan mewujudkan visi misi perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana yang termakhtub dalam Q.s al Kahfi: 110 disebutkan:

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*,h. 51

⁴⁹ Rofi Munawar, “Manajemen Organisasi dalam Al-Qur’an”, 2007, tersedia pada dpdpkstanjabbar.wordpress.com (2007). Di akses pada 25 November 2020.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Katakanlah(Muhammad), Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".⁵⁰

Ayat di atas menegaskan kepada manusia bahwa ketika ingin mencapai visi misi tentu harus melaksanakan semua kewajiban dengan baik mulai dari niat/perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan melakukan peningkatan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk tidak menyekutukanNya, ini berarti dalam upaya mencapai visi misi harus fokus pada tujuan yang dicita-citakan. Dari segi peningkatan mutu pendidikan hal ini juga menunjukkan bahwa memang harus ada upaya penguatan pendidikan yang berkualitas terus menerus, terutama yang berkaitan dengan hal-hal utama dalam pendidikan tinggi itu sendiri yaitu tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hadist berikut memberikan penguatan agar mutu dapat diwujudkan dengan baik.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَّقَنَهُ

Artinya: sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas.⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*h.304

⁵¹ Al- Thabrani, *Mu'jam al-Ausath*, juz 2, (Mauqi'u al-Islam: dalam Software Makhtabah Syamilah, 2005), h.408

Hadist di atas menegaskan bahwa dalam melaksanakan berbagai pekerjaan harus sempurna (*itqan*) sesuai dengan aturan dan standar mutu yang telah ditetapkan, sampai dengan tercapainya tujuan visi, misi perguruan tinggi. Proses pelaksanaan harus benar dan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, di samping itu untuk memastikan setiap tahapan pencapaian seluruh kegiatan harus terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga akan memudahkan bagi tim audit untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan. Peningkatan standar mutu juga perlu ditingkatkan mana kala standar yang ditetapkan telah tercapai, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Insyiroh: 7-8.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧﴾

Artinya: (7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (8) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.⁵²

Ayat di atas menjelaskan agar setiap manusia mengerjakan segala suatu perkara dengan sungguh-sungguh, manusia dituntut untuk memiliki dinamika yang tinggi, peka terhadap perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Diperlukan adanya komitmen dan sikap istiqomah dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan harapan dan tepat waktu.

⁵² Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 596

Proses yang bermutu dapat dilakukan jika anggota lembaga pendidikan bekerja secara optimal, mempunyai komitmen dan istiqamah dalam pekerjaannya. Tanpa adanya komitmen dan istiqomah dari para (pekerja), dalam konteks lembaga pendidikan, civitas akademika, maka lembaga pendidikan tersebut tidak mungkin dapat melakukan proses yang bermutu. Maka dari itu, untuk melakukan proses yang bermutu juga dibutuhkan personalia yang bermutu dan berdedikasi tinggi juga. Sehingga berbuat yang optimal atau berkualitas itu harus dilakukan dalam semua jenjang, semua lini dalam lembaga pendidikan. Apabila semua civitas akademika lembaga pendidikan mampu menyadari akan hal tersebut, maka mutu lembaga pendidikan tersebut akan dapat tercipta.

Berdasarkan pemaparan di atas konsep mutu dalam perspektif Islam dinyatakan dengan kata “*ihsan*” yang berarti kebaikan dan “*itqan*” yang artinya kesempurnaan. Ihsan merupakan kemanfaatan, sedangkan itqan adalah tanpa cacat (*zero defect*).

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dunia pendidikan memahami kualitas sebagai transformasi (*Quality as transformation*), artinya kualitas dipandang sebagai suatu proses perubahan. Proses pendidikan dipahami sebagai proses transformasi yang mengarah ke perubahan kualitatif peserta didik menuju pada peningkatan dan pemberdayaan

mereka.⁵³ Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan guna memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas/ pelanggan. Penjaminan mutu biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen, untuk memberikan bukti-bukti dalam rangka membangun kepercayaan bahwa mutu atau kualitas dapat berfungsi secara efektif.⁵⁴ Diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu yang andal, sehingga ketercapaian visi misi sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dilakukan juga guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pengguna lulusan terhadap kualitas perguruan tinggi.

Secara umum, pengertian Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi yaitu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan. Juga dapat dikatakan sebagai proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.⁵⁵ Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan serta mewujudkan visi kampus melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/ memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan mahasiswa,

⁵³ Florence Imaobong Archibong, "Instructional Supervision In The Administration Of Secondary Education: A Panacea For Quality Assurance", *European Scientific Journal*, Vol. 8 No. 13 (2013), h. 173, [https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 \(Print\) E - ISSN 1857- 7431](https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 (Print) E - ISSN 1857- 7431).

⁵⁴ Uhar Suharsaputra, "Administrasi Pendidikan", (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 237,.

⁵⁵ Sevima.com, "Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi", di akses pada 29 November 2019, n.d., tersedia pada <https://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-akreditasi-perguruan-tinggi/>.

masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana. Parameter dan metode mengukur hasil yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya.⁵⁶ SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.⁵⁷ Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal. Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan,

⁵⁶ H Slamet, "Model sistem penjaminan mutu perguruan tinggi 1", No. 15 (2016), hal. 1–23, tersedia pada <http://repository.uin-malang.ac.id/1312/1/model.pdf> (2016).

⁵⁷ Kemristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Op.Cit.*h.24

Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi. Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi.

Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua SN Dikti dimuat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang ratio dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam

Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS. Data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

2. Prinsip, Fungsi dan Tujuan SPMI

prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Polyteknik, Akademi, Akademi Komunitas).
- 2) Terstandar SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- 3) Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- 4) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- 5) Terdokumentasi Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis. Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar

Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI, menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi.

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Adapun fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah⁵⁸:

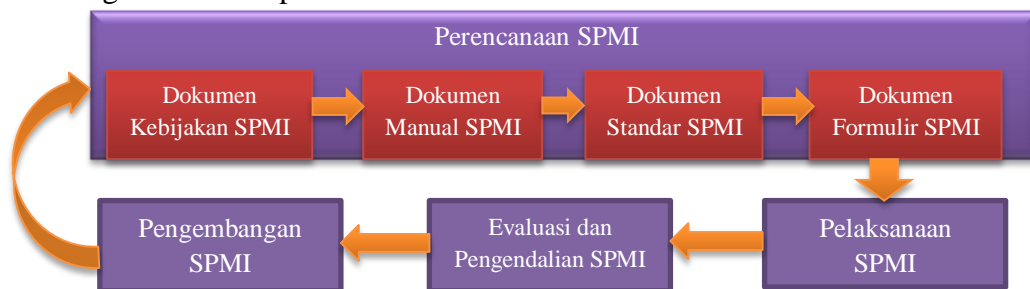
- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.⁵⁹ Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu pertama untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan kedua sebagai pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

⁵⁸ *Ibid.*h.27

⁵⁹ *Ibid.*h.27

SPMI di suatu perguruan tinggi diimplementasikan dengan direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.⁶⁰ Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar berikut⁶¹:



Gambar 4. Keizen SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

- a. Perencanaan SPMI yaitu menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- b. Pelaksanaan SPMI yaitu dengan menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan;
- c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI dengan melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan

⁶⁰ *Ibid.* h.33

⁶¹ Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Op.Cit*, h.31

- d. Pengembangan SPMI dilakukan dengan meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, perguruan tinggi harus memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat terlaksana dengan baik, sehingga visi misi perguruan tinggi dapat tercapai.

3. Matrik Penilaian SPMI

Pengakuan kebermaknaan mutu dari lembaga penjaminan mutu eksternal sangatlah penting, karena penilaian yang sesungguhnya manakala pihak eksternal juga mengakui bahwa perguruan tinggi tersebut bermutu. SPMI dipersiapkan guna mendorong perguruan tinggi agar siap mengikuti penilaian dari lembaga penjamin mutu eksternal yang diakui misalnya LAM, BAN-PT atau bahkan badan akreditasi internasional. Syarat perlu terakreditasi dalam penentuan status akreditasi di poin SPMI yaitu skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$, dan skor butir penilaian

Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$. Perguruan tinggi yang ingin mendapatkan peringkat baik sekali harus memperoleh skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,5$; dan Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,5$. Perguruan tinggi bisa mendapatkan peringkat unggul jika Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 3,0$ dan skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 3,0$. Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi baik sekali.

Berikut merupakan matrik penilaian yang terkait dengan SPMI:

Tabel 4. Matrik Penilaian SPMI

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
7	C.2.4.d	A. ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI 2) Dokumen SPMI 3) auditor internal 4) hasil Audit dan 5) bukti tindak lanjut	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-Dikti, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-Dikti.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek,	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI
7	C.2.4.d Sistem Penjaminan	B. ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan b	Perguruan tinggi memiliki bukti sah	Perguruan tinggi memiliki bukti sah	Perguruan tinggi tidak memiliki	Tidak ada skor kurang dari 2	

	Mutu	<p>udaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil audit internal 2) umpan balik 3) kinerja proses dan kesesuaian produk 4) Status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan <p>Skor= $(A+(2 \times B)) / 3$</p>	<p>terkait praktik baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur</p>	<p>terkait praktik baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur</p>	<p>bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen</p>		
13	C.2.5	<p>Pelampauan SN-Dikti (indikator kinerja tambahan) yang telah ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-Dikti dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan</p>	<p>Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-Dikti dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan</p>	<p>Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan</p>	<p>Tidak ada skor kurang dari 2</p>	
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	<p>Evektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu 2) standar mutu dilaksanakan secara 	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek</p>	<p>Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.</p>

		konsisten 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu	terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	terhadap siklus penjaminan mutu.			
16	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal dan mudah digunakan 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing- masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing- masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing- masing kriteria yang memenuhi 4 aspek	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing- masing kriteria, namun belum memenuhi seluruh aspek	Perguruan tinggi tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing- masing kriteria

4. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar

untuk mencapai tujuan institusi.⁶² Audit mutu internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri (Standar dalam SPMI atau Standar lain yang akan dicapai perguruan tinggi yang bersangkutan), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.

Audit Mutu Internal bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Prinsip Dasar Audit Mutu Internal yaitu:

1. Pelaksanaan harus profesional.
2. Penyajian yang wajar : Wajib memberikan laporan yang objektif.
3. Ketelitian : Kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
4. Independen : Mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit.
5. Berdasar bukti : Penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁶³

Pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam bentuk kegiatan audit mutu internal, minimal dilakukan setiap tahun secara berkala oleh lembaga atau unit penjaminan mutu internal untuk mengevaluasi ketercapaian penyelenggaraan Tridharma di seluruh unit penyelenggara apakah sesuai dengan standar mutu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.⁶⁴ Peningkatan mutu merupakan dambaan semua negara dalam menyelenggarakan pendidikannya. Meningkatkan mutu

⁶² Tim Pengembang SPMI, *Pengertian Audit Mutu Internal*, (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), h. 9

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Dakir & Elbadiansyah, Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan, *Jurnal MUADDIB Vol.07 No.01 Januari-Juli, 2017*, e-ISSN 2540-8348

dibutuhkan rumusan pikiran tentang apa yang hendak ditingkatkan, memilih bagian yang paling dibutuhkan pelanggan, dan menghasilkan produk kegiatan yang paling unggul diantara produk sejenis.⁶⁵

Evaluasi diri dalam Islam mempunyai posisi yang penting. Allah telah memerintahkan dalam sebuah ayat yang menegaskan seorang hamba untuk selalu melakukan evaluasi diri (*self assessment*). Dalam surat At-Taubah ayat 105 disebutkan,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁶⁶

C. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik

Kata akademik berasal dari bahasa Yunani yakni *academos* yang berarti sebuah taman umum (*plasa*) di sebelah barat laut kota Athena.⁶⁷ Secara terminologi inti dari pengertian akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan

⁶⁵ S. Thomas Foster, *Managing Quality; Integrating The Supply Chain*, Third Edition (Person Education, 2007). h. 5

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, h. 203

⁶⁷ M. Fajar, *Mahasiswa dan Budaya Akademik*, (Bandung: Rineka Cipta, 2002), h.56.

sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa.⁶⁸ Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program pembelajaran, diskusi, observasi, dan pengerjaan tugas. Suatu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal saja tetapi juga kegiatan yang direncanakan. Agar kegiatan akademik berjalan dengan baik diperlukan adanya bukti berupa dokumen akademik. Dokumen akademik memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik.⁶⁹ Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Setiap kerangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau kegiatan satuan pendidikan untuk pemenuhan standar, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Melalui monev ini kinerja satuan pendidikan selalu terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien. Setelah monev dilakukan evaluasi diri. Tujuan evaluasi diri adalah untuk peningkatan mutu sedangkan kegunaan evaluasi diri adalah untuk mengungkap mutu berupa efektivitas, akuntabilitas, produktivitas, efisiensi, pengelolaan sistem, dan suasana akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang

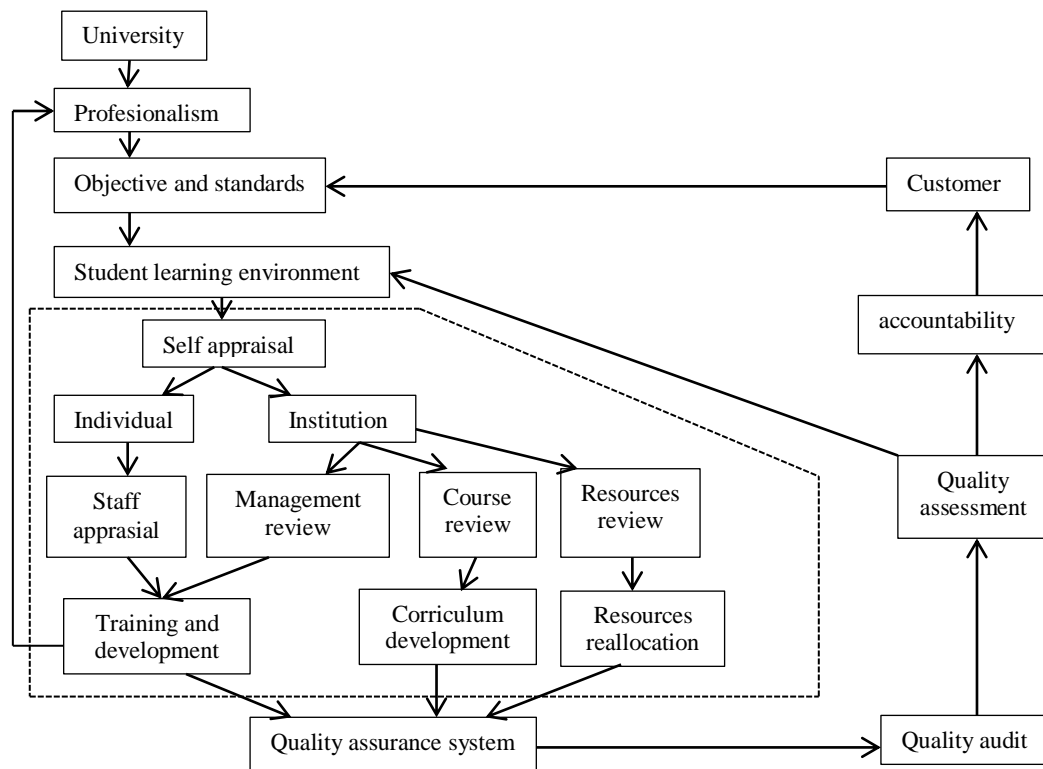
⁶⁸ Imam Barnadib, *Kode Etik Akademik: Telaah Deskriptif Awal* (Yogyakarta: Tamansiswa, 2002), h.14

⁶⁹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) Bidang Akademik*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2016), h.18

independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik.⁷⁰

Secara umum pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan melalui tiga tahapan yaitu⁷¹:

1. Kesepakatan kebutuhan yang akan dipenuhi agar tercapai kepuasan
2. Menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dinilai kualitasnya
3. Melakukan prosedur untuk memastikan kualitas selalu terpelihara.



Gambar 5. Model Penjaminan Mutu Lewis Elton.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan

⁷⁰ *Ibid*, h.19

⁷¹ Lewis Elton, *University Teaching: A Professional Model for Quality*, (Buckingham: Open University Press, 1995), h.135

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.⁷² Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Tujuan utama perguruan tinggi adalah untuk menghasilkan lulusan yang toleran dengan pandangan Islam yang modern dan rasional,⁷³ untuk itu di tiap-tiap perguruan tinggi Islam perlu menjamin ketercapaian tersebut. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana, dengan parameter dan metoda pengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya. Menurut Halimatus Sakdiah menyatakan bahwa tujuan penjaminan mutu internal adalah untuk memperbaiki kinerja dan memberi penjaminan mutu internal, khususnya kepada para stakeholder internal perguruan tinggi, seperti para pimpinan, dosen, peneliti, karyawan dan mahasiswa.⁷⁴

Pasal 52 ayat (2) UU Dikti menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi. Sesuai dengan istilah “*internal*” di dalam SPMI, kelima langkah

⁷² Kementerian Riset, Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), h. 24

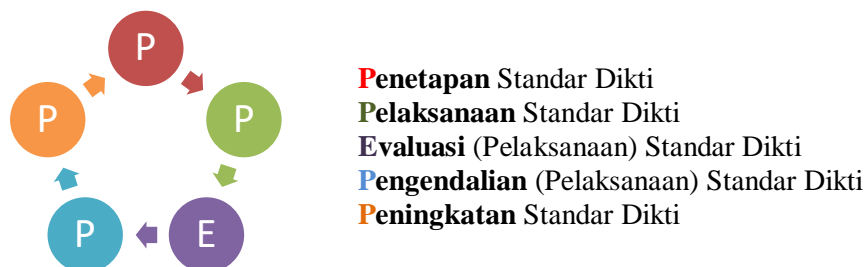
⁷³ Moh. Mukri, “Islamic Education System and Muslim Identity in Southeast Asia.”, *Jawi*, Vol. 2 No. 1 (2019), h. 92, tersedia pada <https://doi.org/10.24042/jw.v2i1.2775> (2019), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021

⁷⁴ Halimatus Sakdiah, Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, (*Jurnal Insania*, vol.16 No.1 Januari-April , 2011) h. 36

tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTN. Di pihak lain, SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) disusun oleh pemimpin PTS beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggaraan (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dll) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTS. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Perlu adanya komitmen bersama serta tanggungjawab besar dalam mengimplementasikan penjaminan mutu *internal* perguruan tinggi, karena tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masing-masing pihak untuk istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan, maka akan sulit mewujudkan visi misi yang telah dijadikan cita-cita bersama seluruh civitas akademika. Berikut merupakan mekanisme SPM Dikti

yang diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:⁷⁵



Gambar 6. Siklus PPEPP

1. Penetapan (P) Standar Pendidikan Tinggi

a. Pengertian Penetapan Standar Dikti

Tahap Penetapan Standar Dikti yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penetapan standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Dikti yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti) dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang

⁷⁵ Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Op.Cit*, h. 17-18.

secara kuantitatif lebih banyak dan/ atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti. Penentuan *substansi*/ isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dijabarkan berdasarkan visi perguruan tinggi yang bersangkutan, karena visi perguruan tinggi merupakan tolok ukur utama untuk menentukan *substansi*/ isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Semakin jauh visi perguruan tinggi yang ditetapkan, maka semakin beragam *substansi*/ isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sehubungan dengan itu, kepemilikan visi perguruan tinggi oleh suatu perguruan tinggi merupakan persyaratan mutlak, selain karena akan memberikan arah ke mana perguruan tinggi akan dikembangkan, juga berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan *substansi*/ isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

b. Langkah-langkah Penetapan Standar Dikti

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam merumuskan standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yaitu:

- 1) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, berupa Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Permendikbud, dan Permenristekdikti yang mengatur Pendidikan Tinggi); Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi; Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; Hasil analisis SWOT (*strengths*,

weaknesses, opportunities, threats) perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; dan Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.

- 2) melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- 3) menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
- 4) merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan);
- 5) melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;

- 6) melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- 7) menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- 1) *Tim ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- 2) Lembaga/ kantor/ unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Seluruh *stakeholder* dalam suatu perguruan tinggi harus memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, oleh karena itu diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, yang selanjutnya dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

Penetapan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik. Apabila suatu perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan terlebih dahulu Kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat sebagai Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan Standar Standar Dikti. Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi akan ditemukan pula macam dan jumlah Standar Dikti yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI perguruan tinggi tersebut.
- 2) Ketersediaan Dokumen Manual SPMI untuk Pendidikan Akademik Setelah Visi Perguruan Tinggi dan macam serta jumlah Standar dalam Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka penetapan Standar Dikti untuk pendidikan Akademik harus dilakukan berdasarkan Manual Penetapan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang merupakan salah satu manual dari Dokumen Manual SPMI, yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar Dikti, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, dan Manual Peningkatan Standar Dikti.

Berdasarkan uraian tentang Manual di atas maka khusus penetapan Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik, harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalam Manual SPMI):

- 1) Pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan (P Pertama dari siklus PPEPP) Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik: a) Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, yang terdiri atas: (1) Pimpinan perguruan tinggi; (2) Pimpinan fakultas (jika ada); (3) Pimpinan unit pengelola program studi; dan (4) dosen. Jika perguruan tinggi memiliki unit khusus SPMI, maka unit tersebut yang akan mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; b) Mengambil Visi perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan; c) Mengambil nama Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan; d) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; e) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik, antara lain dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicators*) atau bentuk lain yang dipandang paling

cocok; f) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik berdasarkan visi perguruan tinggi, nama Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; g) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI untuk pendidikan Akademik kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu); h) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; i) Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, dan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) atas Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; j) Menetapkan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dalam Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk PTN, atau meminta Keputusan Badan Penyelenggara untuk PTS.

- 2) Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut: a) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/ Ketua/Direktur); b) Pekerjaan angka 1) huruf b) sampai dengan huruf h) dilakukan oleh Tim Perumus atau unit SPMI; c) Pekerjaan angka 1) huruf i) dan huruf j) dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/ Ketua/Direktur).

- 3) Cara pekerjaan tersebut harus dilakukan: a) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan calon anggota Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit terkait di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit SPMI (jika ada), untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur); b) Pekerjaan angka 1) huruf b), huruf c) dan huruf d) dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD di antara Tim Perumus atau Unit SPMI) Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016; c) Pekerjaan angka 1) huruf e) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit SPMI mengenai bentuk rumusan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; d) Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menugaskan kelompokkelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan sejumlah Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; f) Pekerjaan angka 1) huruf h) dilakukan dengan cara

menyelenggarakan rapat Tim Perumus atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; g) Pekerjaan angka 1) huruf i) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin PTN menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Akademik. Untuk PTS, Pemimpin PTS menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Akademik. Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik ini merupakan isi dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat) Dokumen SPMI lain yang harus ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti. 4) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan Berbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun. Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tersedia, maka

implementasi SPMI masuk pada tahap Pelaksanaan (P Kedua dari siklus PPEPP) SPMI, yaitu Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Tabel 5. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)			
SN Dikti		Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;	Kelompok Standar Bidang Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;
Kelompok Standar Nasional Penelitian		Kelompok Standar Bidang Non Akademik	
Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat			

2. Pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi

a. Pengertian Pelaksanaan Standar Dikti

Pelaksanaan standar Dikti yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu

perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu. Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

b. Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan Standar Dikti

Langkah yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, adalah mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan di dalam Dokumen Manual Pelaksanaan SPMI yang juga harus ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penerapannya tidak dapat digeneralisasi untuk semua Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Langkah-langkah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik diuraikan seperti berikut:

- 1) Persiapan Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Ketika sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik akan diberlakukan, biasanya diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau administratif, sesuai isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.

- 2) Sosialisasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Langkah strategis berikutnya adalah menyosialisasikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut.

- 3) Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Untuk melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencatat/merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Akademik, misalnya untuk pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan diperlukan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), untuk memantau bahan kajian yang disajikan di dalam kegiatan tatap muka diperlukan dokumen Berita Acara Perkuliahan.

4) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilaksanakan atau dilaksanakan dengan menggunakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Pada saat akan dilaksanakan, Pemimpin perguruan tinggi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik di perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Selain berbentuk deklarasi, sosialisasi pelaksanaan Standar untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll. Upaya sosialisasi juga dapat ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya. Dapat pula dilakukan dengan menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus

atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Standar Dikti, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan melaksanakan Standar Standar Dikti Pendidikan Akademik tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor sebagai program pendidikan di dalam jenis Pendidikan Akademik dapat berbeda karena perbedaan karakter masing-masing Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang berlaku pada masing-masing program pendidikan tersebut. Contoh kekhasan pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Akademik Untuk pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sebagaimana ditetapkan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, harus memperhatikan adanya perbedaan di masing-masing program pendidikan dan jenis pendidikan tinggi, khususnya mengenai Standar Pengetahuan sebagai bagian dari Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah dikemukakan di dalam Bagian tentang Penetapan Standar Kompetensi Lulusan di atas.

- 2) Standar Isi Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, pada pendidikan akademik Program Magister dan Program Doktor, harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di kedua program tersebut, yaitu wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Standar Proses Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik Menurut Pasal 14 ayat (2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler, wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah, untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran sebagaimana disebut dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Metode pembelajaran berbasis proyek atau metode pembelajaran berbasis masalah, lebih sering dipilih untuk jenis Pendidikan Akademik pada Program Magister dan Program Doktor. Sementara, pada Program Sarjana penggunaan metode pembelajaran seperti simulasi dan diskusi kelompok lebih dikedepankan, agar capaian pembelajaran tercapai secara efektif. Bentuk pembelajaran seperti seminar sering

diterapkan pada Program Magister dan Program Doktor, sementara untuk Program Sarjana lebih sering menerapkan bentuk pembelajaran yang berupa kuliah, responsi dan tutorial, serta praktikum. Namun, tetap harus diperhatikan untuk semua jenjang pendidikan, bahwa sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, karakteristik proses pembelajaran itu terdiri atas sifat yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- 4) Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik Menurut Pasal 23 ayat (3) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, pada penilaian hasil proses pembelajaran Program Doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. Sementara untuk Program Sarjana dan Program Magister tidak terdapat syarat tersebut. Standar minimal seperti ini harus diperhatikan ketika Standar tersebut akan diimplementasikan. Hal lain adalah tentang kelulusan, pada Pasal 25 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti telah ditetapkan bahwa kriteria minimal untuk kelulusan mahasiswa Program Sarjana, apabila mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan pada program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Sementara, untuk mahasiswa Program Magister dan Program

Doktor kriteria minimal kelulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- 5) Pelaksanaan Standar Dosen pada Pendidikan Akademik, hal yang perlu diperhatikan pada masing-masing Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, sebagaimana ditetapkan baik pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti maupun pada Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, bahwa dosen paling sedikit harus berjumlah enam orang untuk satu Program Studi. Kualifikasi dosen tersebut paling rendah berijazah magister, atau yang setara untuk Program Sarjana, berijazah doktor atau yang setara untuk Program Magister dan Program Doktor. Selain itu, ditegaskan pula bahwa dua dosen pada Program Doktor harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi. Perlu juga diperhatikan mengenai nisbah dosen dan mahasiswa, yaitu 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa pada program studi kelompok ilmu sosial dan 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa pada program studi kelompok ilmu alam. Pelaksanaan Standar Dikti perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan Standar dalam SPMI perlu dimuat dalam Rencana Strategis (lima tahun), Rencana Kerja dan Anggaran (tahunan), baik di aras

universitas, fakultas (jika ada), maupun unit pengelola program studi (jurusan, departemen, bagian).

3. Evaluasi (E) Standar Dikti

a. Pengertian Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti

Evaluasi dalam SPMI yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/ kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah

ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring) disingkat “monev”.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*. Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan:

- 1) Memastikan Standar Dikti telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- 2) Mengantisipasi dan/ atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar Dikti yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
- 3) Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berjalan.

b. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar dalam SPMI, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan

oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi bersangkutan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME (sistem penjaminan mutu eksternal). Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- 1) Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- 2) Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- 3) Hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan
- 4) Dampak atau *out comes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti tidak selalu sama. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/ rekaman pelaksanaan Standar Dikti, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik diantaranya:

- 1) Prosedur evaluasi diawali dengan menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan *Evaluasi Diagnostik*, *Evaluasi Formatif*, dan *Evaluasi Sumatif*. *Evaluasi Diagnostik* dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat berlangsung dengan baik. *Evaluasi Formatif* dilakukan pada saat setiap Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik sesuai dengan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. *Evaluasi Sumatif* dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik sudah

selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.

- 2) Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai isi Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik.
- 3) Tim Evaluasi mencatat/ merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah dilaksanakan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau *evaluator* yang

dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (*monev*), oleh atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh tim *Auditor Internal*, melalui kegiatan *Audit Mutu Internal* (AMI). Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk pendidikan Akademik. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah kegiatan yang *independen, obyektif*, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti. Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektifitas AMI sebagai sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI. Contoh pelaksanaan AMI yaitu pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan Akademik; pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik; pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi

peningkatan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik kepada pimpinan perguruan tinggi. Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara *obyektif*, perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah antara pimpinan unit, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan pihak lain terkait. Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat dicapai secara *efisien* dan *efektif*, melalui:

- 1) Pemeriksaan kehandalan sistem pengelolaan dana;
- 2) Pemeriksaan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya;
- 3) Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur.

Praktik baik AMI dijalankan melalui beberapa langkah, yaitu:

- 1) Menyiapkan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau *desk evaluation* untuk digunakan oleh auditor atau atasan;
- 2) Menyusun daftar temuan (*findings*) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut

disampaikan kepada teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit);

- 3) Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh teraudit terhadap temuan. Teraudit dapat melakukan klarifikasi, pertanyaan maupun sanggahan terhadap temuan tersebut. Tindak lanjut yang telah disetujui disusun dalam laporan audit disertai kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan bersama teraudit.

4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti

a. Pengertian Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti

Yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI. Hasil dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik terdapat empat kemungkinan kesimpulan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;

- 3) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
- 4) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.

b. Langkah Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti

Berikut disajikan langkah-langkah pengendalian standar Dikti⁷⁶:

Tabel 6. Langkah Pengendalian Standar Dikti Pendidikan Akademik.

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampaian dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Pihak yang harus mengendalikan pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah pihak yang mengelola pelaksanaan Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi

⁷⁶ Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Op.Cit*, h.71

Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun sebatas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik, sebenarnya di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik. Seandainya suatu Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik agar Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau monitoring.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/ kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatkan (P) Standar Dikti

a. Pengertian Peningkatan Standar Dikti

Yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Peningkatan Standar dalam SPMI adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik, hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik. Peningkatan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik tidak mungkin dilakukan jika Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik itu belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik itu masih dapat ditingkatkan.

Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam

SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam SPMI untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan *internal* dan/atau *eksternal* perguruan tinggi. Isi Standar dalam SPMI yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. *Kaizen* setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. *Kaizen* atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar dalam SPMI, perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

b. Langkah-langkah Evaluasi dalam SPMI

Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yaitu:

- 1) Peningkatan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik harus dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) dari Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara *sporadis* untuk beberapa Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik tertentu dengan *Audience* yang sama, sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dilakukan secara kelembagaan, yaitu pemimpin perguruan tinggi (Rektor/ Ketua/ Direktur) harus mengoordinasikan kegiatan peningkatan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik ini. Dapat pula koordinasi *kaizen* Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan (jika ada), atau oleh Tim Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang secara khusus dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- 2) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural

dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut;

- 3) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan. Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan *benchmarking*, karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan;
- 4) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sebelumnya.

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat berupa:

- 1) Rumusan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik sebelumnya, misalnya peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik.

- 2) Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik ini sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/ isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.
- 3) Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ada sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik baru ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) disusun oleh pemimpin PTS beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dll) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTS. SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTN. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan

kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI disuatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI) serta implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

D. Penelitian Terdahulu

1. Borahan dan Ziarati (2002) melakukan penelitian dengan judul “Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sector in Turkey”.⁷⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan kriteria-kriteria untuk mutu perguruan tinggi dan penerapannya di sektor perguruan tinggi di Turki. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kriteria kualitas check-list telah menyebabkan pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO. Check-list diminta untuk mengidentifikasi strategi manajemen dan telah menyebabkan pengembangan model kualitas TQM. Sistem kualitas model yang didasarkan pada ISO 9000 dimana hal manufaktur telah diterjemahkan ke prosedur yang tepat untuk diadopsi dalam lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini relevan untuk menyatakan bahwa Sistem Mutu

⁷⁷ Borahan dan Reza Ziarati, Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sector in Turkey, *Journal Total Quality Management* Volume 13, Issue 7, 2002, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0954412022000017021>

ISO adalah lebih berkaitan dengan proses daripada kinerja siswa. Check-list akan memungkinkan persyaratan TQM yang akan dibangun dalam model kualitas TQM secara keseluruhan. Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO dalam mengembangkan kriteria-kriteria untuk mutu perguruan tinggi dan penerapannya di sektor perguruan tinggi, sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti bagaimana peran sistem penjaminan mutu internal melalui SPMI bidang akademik dalam peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi di IAIN Metro Lampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh H. Asbeni, Ahmad Tohardi, dan Rusdiono (2013) dengan judul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas”.⁷⁸ Penelitian ini menegaskan bahwa melalui implementasi SPMI pada perguruan tinggi, diharapkan kemandirian sebuah perguruan tinggi dapat tercipta dengan sendirinya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk melihat bagaimana upaya Perguruan Tinggi membangun citra positif dalam pengelolaan lembaganya dapat dilihat dari proses implementasi SPMI melalui SOP. Data lapangan memperlihatkan permasalahan yang menunjukkan bahwa penerapan SOP belum melalui tahapan prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SOP dan proses implementasi SPMI yang dijalankan di

⁷⁸ H.Asbeni, dkk, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*

POLTESA belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan pedoman SPMI. Oleh karena itu, agar SOP dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan maka seluruh komponen dalam manajemen perguruan tinggi agar dapat segera mendorong terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan SPMI di lembaga dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam proses implementasi SPMI. Para pengambil keputusan di lembaga harus mendorong ketersediaan anggaran yang dapat mengoptimalkan proses penerapan SOP, serta mengoptimalkan kegiatan audit internal sebagai sarana evaluasi penerapan SOP untuk meningkatkan proses implementasi SPMI dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi. Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya yang lebih fokus membahas penerapan SOP untuk mewujudkan implementasi SPMI dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada SPMI bidang akademik di IAIN Metro.

3. Andi Arif Rifa'i (2019) melakukan penelitian dengan judul "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia".⁷⁹ Penelitian ini mengungkapkan adanya problem tentang rendahnya mutu SDM suatu bangsa yang merupakan wujud dari belum mampunya sistem penjaminan mutu bekerja secara efektif. Penerapan model yang kurang efektif dalam penjaminan mutu berdampak pada pencapaian mutu Pendidikan yang kurang optimal. *Quality Manajement* bertujuan menjamin terciptanya mutu, dalam aktifitasnya; menjamin mutu perencanaan (*Quality Planning*), mutu evaluasi (*Quality Control*) dan Penjaminan Mutu (*Quality*

⁷⁹ Arif Rifa'I, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia, *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* Vol. 5 No. 1 Juli 2019.

Assurance). Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa jaminan kualitas Internal Perguruan tinggi pada hakekatnya berusaha memberikan jaminan kualitas pada outcome yang dihasilkan. Jaminan tersebut diimplementasikan dalam standarisasi proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma). Lulusan PT yang terjamin mutunya, diharapkan dapat diterima pada berbagai sektor. *Internal Quality Assurance* (Unit Penjamin Mutu PT) dan *Eksternal Quality Assurance* (BAN-PT) menjadi ujung tombak dalam memberikan jaminan kualitas pada stakeholder penerima manfaat PT, baik orang tua mahasiswa yang terpenting lagi adalah pasar dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya berfokus pada TQM dalam memaksimalkan implementasi SPMI dan SPME, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada SPMI bidang akademik sehingga lulusan dapat memiliki kualifikasi yang sesuai dengan program studi yang diambil serta dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

E. Kerangka Pikir Penelitian

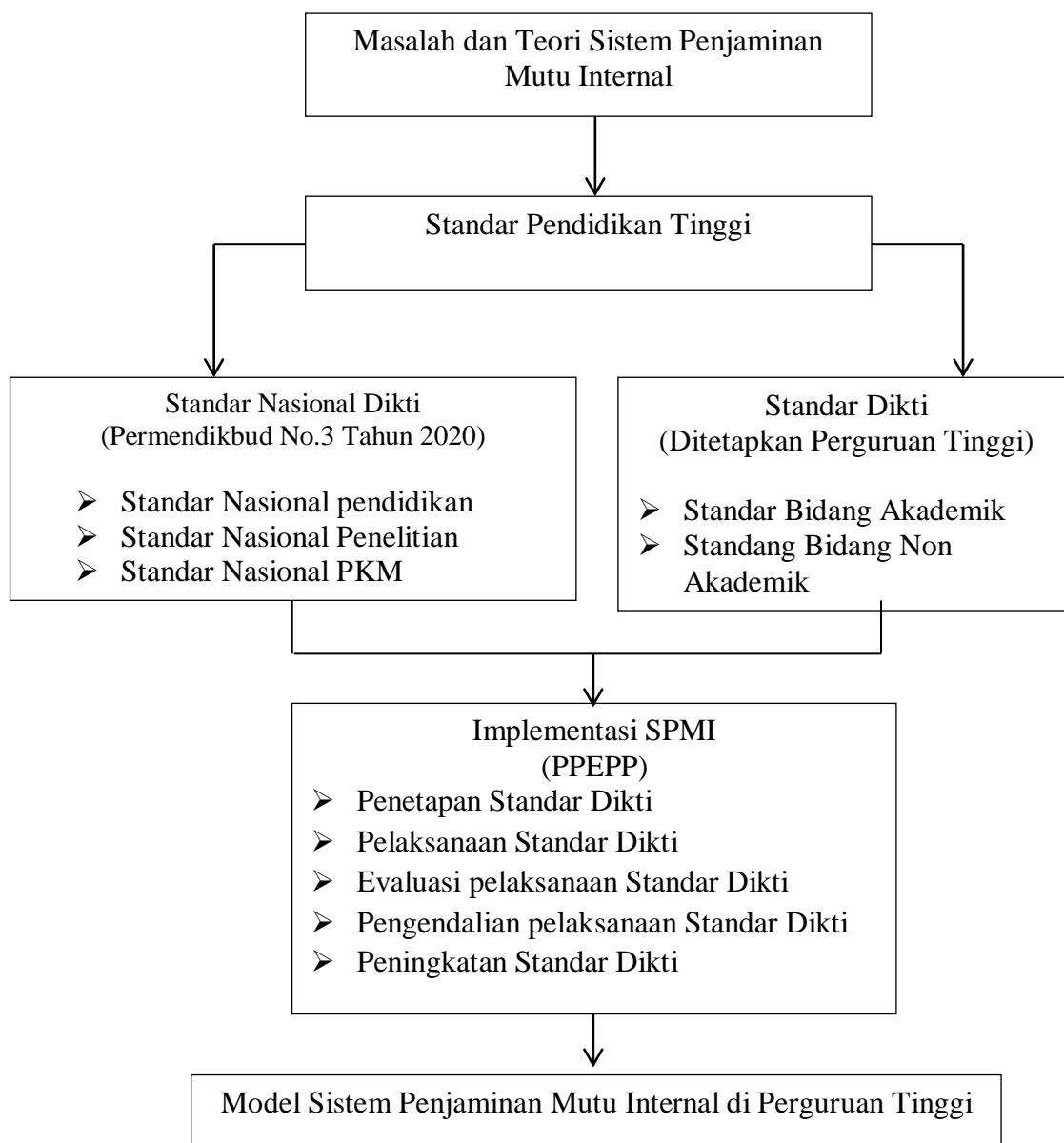
Mutu pada setiap perguruan tinggi perlu ditingkatkan secara terus menerus berkelanjutan, peningkatan dan prioritas pencapaian standar mutu disetiap perguruan tinggi tentu berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan, situasi dan kondisi internal perguruan tinggi. Penggalan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perlu dilakukan untuk menemukan hal-hal yang paling mendasar guna mencapai visi misi perguruan tinggi secara

efektif dan efisien. Oleh sebab itu diperlukan adanya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berjalan dengan baik dalam suatu siklus pada perguruan tinggi, dimana SPMI ini harus dipahami oleh seluruh civitas akademika.

SPMI merupakan standar mutu yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kondisi internal yang ada. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ini harus melampaui dari SN Dikti baik secara kuantitatif ataupun kualitatif, SN Dikti sendiri merupakan standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Perpaduan SN Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, selanjutnya harus diimplementasikan dalam satu siklus SPMI yang terdiri dari penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar Dikti, evaluasi pelaksanaan standar Dikti, pengendalian pelaksanaan standar Dikti dan peningkatan standar Dikti (PPEPP).

Implementasi SPMI diperguruan tinggi ini selanjutnya harus menjadi model sistem penjaminan mutu perguruan tinggi sehingga dipahami dan dilaksanakan dengan benar dan tepat oleh seluruh *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan-peningkatan standar mutu secara teratur dan signifikan dalam rangka menuju pencapaian visi dan misi perguruan tinggi dengan terukur, jelas dan pasti sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

Berikut penulis sajikan gambar kerangka pikir penelitian model sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara sistematis agar mudah dipahami:



Gambar 7. Kerangka Pikir Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. S & Udik B.W. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada". *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Vol. 4 no. 1. 2016.
- Al-Thabrani, *Mu'jam al-Ausath juz 2*. Mauqi'u al-Islam: dalam Software Makhtabah Syamilah, 2005.
- Anwar, Syaiful. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7 (2016).
- Arcaro, Jerome S. (Terjemah: Yosol Iriantara). *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Archibong, Florence Imaobong. "Instructional Supervision In The Administration Of Secondary Education: A Panacea For Quality Assurance". *European Scientific Journal*. Vol. 8 no. 13 (2013), hal. 173. [https://doi.org/ISSN:1857-7881\(Print\)E-ISSN1857-7431](https://doi.org/ISSN:1857-7881(Print)E-ISSN1857-7431).
- Asbeni, H. dkk. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*
- Badan Pusat Statistik, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2019", 2019, tersedia pada https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1872/api_pub/WVRIT_TcySIZDa3IUcFp6czNwbHI4QT09/da_03/1 (2019)
- Barnadib, Imam. *Kode Etik Akademik: Telaah Deskriptif Awal* (Yogyakarta: Tamansiswa, 2002).
- Bendriyanti, Rita Prima. "Manajemen Mutu Layanan Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Di Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Bengkulu". *Jurnal TARBAWI*. Vol. 1 no. 1 (2015).
- Bintang PS & Ika L. "Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi". *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*. Vol. 32 no. 1 (2018), tersedia pada doi:<https://doi.org/10.21009/PIP.321.6> (2018).
- Bogdan, Robert dan Biklen. *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methode*. Boston London: Allyn And Bacon, 1982.
- Borahan dan Reza Ziarati, Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sector in Turkey, *Journal Total Quality Management* Volume 13, Issue 7, 2002, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/>

0954412022000017021

- Bramastia, “New Normal Rasio Dosen dan Mahasiswa”, *Koran Sindo*, tersedia pada <https://www.sindonews.com/> (Agustus 2020), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed methods approaches*. Amerika: Sage Pulication, 2009.
- Crosby, Philip. *Quality Is Free*. New York: McGrow-Hill, 1979.
- Dacholfany, M Ihsan. “Inisiasi strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi”. *Jurnal At-Tajdid*. Vol. 1 no. 1 (2017).
- Dakir & Elbadiansyah, Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan, *Jurnal MUADDIB Vol.07 No.01 Januari-Juli, 2017*, e-ISSN 2540-8348.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygm a Examedia Arkanleema, 2009).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. IAIN Metro PTKIN Pertama Penerima ISO 21001:2018 EOMS. Berita Pendidikan Islam. 2019. tersedia pada <http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=11160#.YCJKg7eyRPw>, diakses pada 9 Januari 2020
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Pedoman Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003.
- Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
- Deming, W. Edwards. *Out Of The Crisis*. London, England: MIT Center for Advanced Educational Service, 1986.
- Elton, Lewis. *University Teaching: A Professional Model for Quality*. Buckingham: Open University Press, 1995.
- Evans, R. James. *The Management and Control of Quality*. Singapore: The Thomson, 2005.
- Foster, S. Thomas. *Managing Quality; Integrating The Suply Chain*, Third Edition (Person Education, 2007).
- Hijriyah,Umi dkk. “Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Tipe Kepribadian Terhadap Konflik Sosial Kelompok Antar Agama (Studi Survey Pada Lingkungan Pendidikan Di Tingkat Menengah Atas Kabupaten Lamsel)”.

Bandar Lampung, 2013.

Hunt, Daniel. *Managing for Quality*. Illinois: Businessone Irwin, 1992.

IAIN Metro,. “Visi dan Misi”. 2014. tersedia pada <http://www.metrouniv.ac.id/?page=konten&&cur=05d9dd97734eefd5a793061c7b252d1a> (2014).

Jerome S. (Terjemah: Yosol Iriantara) Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).

Juran, Joseph. “The Juran Triloqy”. *Journal Quality Progress*. Vol. 19 (1986).

Kemenristek Dikti. “Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi”. 2016. tersedia pada <http://www.kopertis12.or.id/wp-content/upluods/2016/06/smallsosialisasiSNDikti2016.pdf> (2016).

Kemenristek dikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi dan PJJ* 2018.

Kholid, Idham. “Motivasi dalam Pembelajaran Asing”, *Jurnal Tadris Bahasa Inggris*, Vol. 10 No. 1 (2017), tersedia pada <https://doi.org/10.24024/ee-jtbi.v1oi1.875> (2017), diakses pada Rabu, 3 Maret 2020

Koswara, Deni dan Nani Hartini. *Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: Alfa Beta, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mu'alimin. *Menjadi Sekolah Unggul* (1 ed.). Yogyakarta: Gading Pustaka, 2014.

Mubarak, Faisal. “Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam”. *Jurnal Management of Education*. Vol. 1 no. 1 (n.d.). <https://doi.org/ISSN 977-24442404>.

Mukri,Moh. “Islamic Education Systen and Muslim Identity in Southeast Asia.”, *Jawi*, Vol. 2 No. 1 (2019), tersedia pada <https://doi.org/10.24042/jw.v2i1.2775> (2019), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021

Munawar, Rofi. “*Manajemen Organisasi dalam Al-Qur'an*”. 2007. tersedia pada dppkstanjabbar.wordpress.com (2007).

Murata, Shaciko & William C. *Trilogi Islam: Islam, Iman dan ihsan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Mutohar, Prim Masrokan. “Formulasi Strategi Peningkatan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Timur”. *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 4 no. 2 (2019).

Muslim Hadist Shahih (no. 2664), “Ahmad (II/366, 370); Ibnu Majah (no. 79,

4168); an-Nasa-i dalam *Amalul Yaum wal Lailah* (no. 626, 627); at-Thahawi dalam *Syahr Musykilil Aatsar* (no. 259, 260, 262); Ibnu Abi Ashim dalam *Kitab as-Sunnah* (no. 356).

Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.

Olssen, Mark. *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*. London: Sage Publications, 2004.

Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019. tersedia pada https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf (2019).

Patimah, Siti & Safriadi, "Developing State Islamic University AS a World-Class Center for Studying Islam", in *Proceeding of the 1ST Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences 9RIICMUSS2019*, (Indonesia: Atlantis Press, 2020), tersedia pada <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.028> (2020).

Peraturan Presiden No.8. "Indonesia, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional". (2012).

Permendikbud No. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2020).

Prawirosentono, Suyadi. *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu total Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Rabiah, Siti. "Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". *Jurnal Sinar Manajemen*. Vol. 16 no. 1 (2019), hal. 64. <https://doi.org/E-ISSN 2598-398X | P-ISSN 2337- 8743>.

Rifa'I, Arif. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia, *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* Vol. 5 No. 1 Juli 2019.

Rohiat. *Manajemen Sekolah*. Bandung: PT Refika Adikarya, 2010.

Sakdiah, Halimatus. Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, (*Jurnal Insania*, vol.16 No.1 Januari-April , 2011).

Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education: Third Edition*. 2014. <https://doi.org/10.4324/9780203417010>.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sevima.com. "Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi

Perguruan Tinggi”. di akses pada 29 November 2019 n.d. tersedia pada <https://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-akreditasi-perguruan-tinggi/>.

Slamet. “Model sistem penjaminan mutu perguruan tinggi 1”., no. 15 (2016). tersedia pada <http://repository.uin-malang.ac.id/1312/1/model.pdf> (2016).

Sufia, Siti. “IAIN Metro Menuju Standar ISO 9001:2015 dan 21001:2018”. (Metro, 2019). tersedia pada <http://metrouniv.ac.id/?page=berita&&cur=a0ea153e891ae48022b21e8b66a366aa> (2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfa beta, 2016),

Suharsaputra, Uhar. “Administrasi Pendidikan”., 237. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Suherman, Ade, dkk. “Meningkatkan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi”. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan*. Vol. 1 no. 2 (2018).

Stracke, Christian M. “Quality Frameworks and Learning Design for Open Education Introduction: The Need to Change Learning and Education”. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*. Vol. 20 no. 2 (2019). tersedia pada www.scholar.google.com (2019).

Teknik Elektronika. “Pengertian Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act)”. Diakses pada 22 Oktober 2020. tersedia pada <https://teknikelektronika.com/pengertian-siklus-pdca-plan-do-check-act/> (2020).

Tim Pengembang SPMI, *Pengertian Audit Mutu Internal*, (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20. Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

Usman H. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (4 ed.). Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wibowo, Erwin Dwi Edi. “Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi”. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53 no. 9 (2013), hal. 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004M>.

Wikipedia. “PDCA”. tersedia pada <http://id.m.wikipedia.org>.